

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5) ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah KAbupaten uwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21);
32. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- KESATU : Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 21 Juli 2023



PIH. KEPALA PELAKSANA,

MASDIN, AP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19730315 199311 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunannya.

Malili, 21 Juli 2023

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
MASDIN, AP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730315 199311 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	95
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	98
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	113
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	11
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	140

DAFTAR TABEL T-C

Tabel TC.29	: Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	11
Tabel TC.30	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
Tabel TC.31	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	99
Tabel TC.32	: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	114
Tabel TC.33	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Renja BPBD Tahun 2023.	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1	25
Tabel 2 : Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2022	30
Tabel 3 : Pencapaian Kinerja dan Anggaran	33
Tabel 4 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
Tabel 5 : Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	35
Tabel 6 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka MenengahPerlindungan Masyarakat	36
Tabel 7 : Target SPM Capaian Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	37
Tabel 8 : Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	37
Tabel 9 : Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	38
Tabel 10: Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	39
Tabel 11: Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	42
Tabel 12: Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	44
Tabel 13: Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	54
Tabel 14: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung.....	62
Tabel 15: Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	65
Tabel 16: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel 17: Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	66
Tabel 18: Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)	68
Tabel 19: Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten khususnya Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan pengelolaan bencana tersebut diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran yang optimal. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

1. Program dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

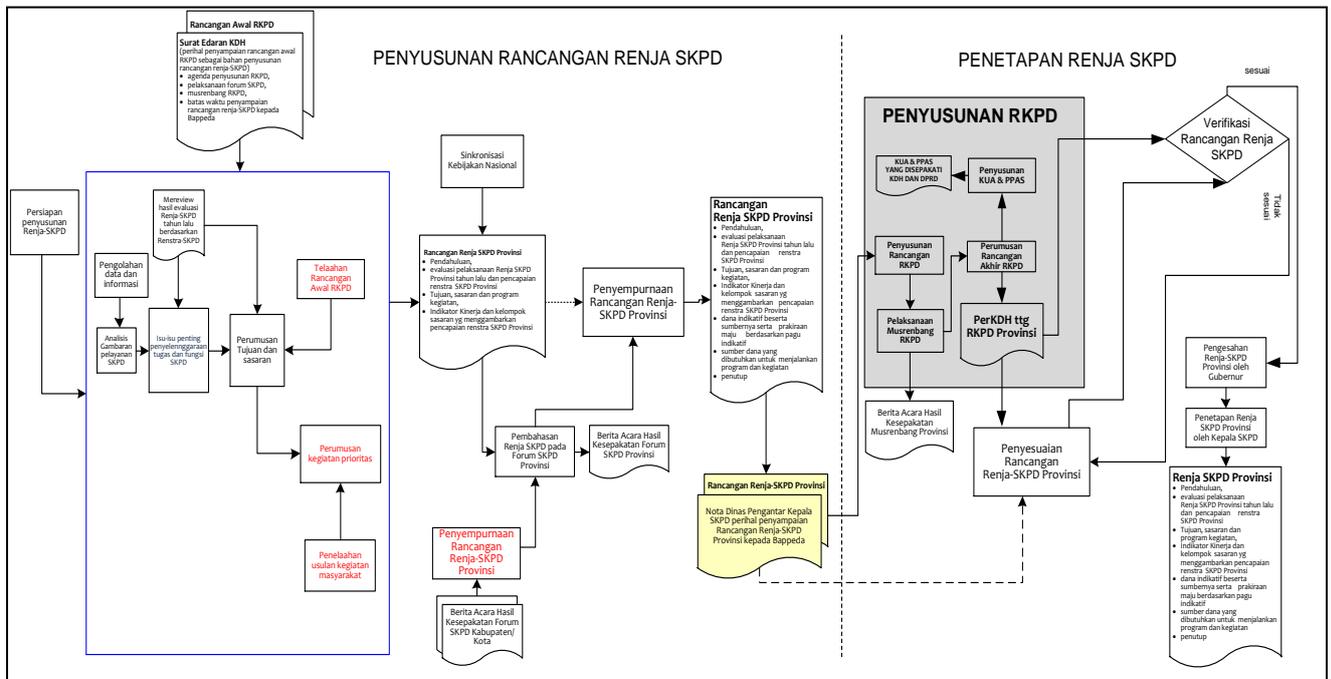
Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

3. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

Rencana Kerja Perubahan BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu BPBD harus mampu mengambil peran secara optimal, utamanya di dalam penganggulangan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun

Rencana Kerja Perubahan BPBD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra BPBD 2021-2026.

Peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah KAbupaten uwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21);
33. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pencegahan, penanggulangan bencana , kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2023 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana penanggulangan bencana.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran renstra serta program dan kegiatan yang direncanakan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.
- BAB V PENUTUP**, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 s.d Tahun berjalan(*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020(tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target Renja SKPD 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
1	WAJIB										
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	0 %	100 %	125 %	125 %	100 %	125 %	125 %	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	13 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150 %	2 Dokumen	5 Dokumen	38 %	

1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	12	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	150	%	2	Dokumen	5	Dokumen	42	%
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	12	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	150	%	2	Dokumen	5	Dokumen	42	%
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	60	Dokumen	0	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100	%	10	Dokumen	20	Dokumen	33	%
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	%	0	%	100	%	89.47	%	89.47	%	93.33	%	91	%	91.40	%
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	120	Orang	0	Orang	19	Orang	15	Orang	78.95	%	15	Orang	30	Orang	25	%
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	108	Dokumen	0	Dokumen	18	Dokumen	18	Dokumen	100	%	18	Dokumen	36	Dokumen	33	%
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	#DIV/0!	%	0	Dokumen	0	Dokumen	0	%

1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	8 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	24 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	8 Dokumen	33 %
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	50 %	50 %
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	105 stel	0 stel	18 stel	18 stel	100 %	0 stel	18 stel	17 %

1	05	02	01	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	83 Orang	0 Orang	10 Orang	15 Orang	150 %	25 Orang	40 Orang	48 %
1	05	02	01	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0! %	0 Laporan	0 Laporan	0 %
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	105.3 %	105.30 %	100.4 %	103 %	102.9 %
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	120 jenis	0 jenis	20 jenis	19 jenis	95.00 %	20 jenis	20 jenis	16 %
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1625 orang	0 Orang	275 Orang	272 Orang	98.91 %	275 Orang	547 Orang	34 %
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	48 jenis	0 jenis	8 jenis	8 jenis	100 %	8 jenis	16 jenis	33 %
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 eksp	0 eksp	60 eksp	60 eksp	100 %	60 eksp	120 eksp	33 %

1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	18 jenis	0 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	3 jenis	6 jenis	33 %
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	353 kali	0 kali	58 kali	80 kali	137.93 %	71 kali	151 kali	43 %
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	66.66 %	67 %	66.66 %
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0! %	0 Unit	0 Unit	0 %
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	91 unit	0 unit	7 unit	6 unit	85.71 %	13 unit	19 unit	21 %
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	8 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %

1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	27 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	4 unit	4 unit	15 %	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %	
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %	
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0 %	100 %	99.86 %	99.86 %	111.91 %	106 %	105.89 %	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2400 Surat	0 surat	400 surat	498 surat	124.50 %	543 surat	1,041 surat	43 %	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	12 orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	100 %	2 Orang	4 Orang	33 %	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	216 rekening	0 rekening	36 rekening	36 rekening	100 %	36 rekening	72 rekening	33 %	

1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	0 %	100 %	93.25 %	93.25 %	113.6 %	103 %	103.43 %
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	15 unit	0 unit	13 unit	13 unit	100 %	13 unit	26 unit	173 %
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	0 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	4 unit	33 %
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	110 unit	0 unit	79 unit	63 unit	79.75 %	52 unit	115 unit	105 %
1	05	02	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

1	05	02	05	06	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	0 %	100 %	88.23 %	88.23 %	92.16 %	90.20 %	90.20 %
						2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
						(3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.75 %	0 %	0.10 %	0.093 %	93.00 %	0.09 %	0.09 %	12.20 %
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal (dokumen)	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	2250 orang	0 Orang	300 Orang	280 Orang	93.33 %	262 Orang	542 Orang	24.09 %
1	05	03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21.8 %	0 %	0.21 %	0.33 %	157.14 %	2.12 %	2.45 %	11.23 %
						Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	300 Orang	0 Orang	45 Orang	44 Orang	97.78 %	40 Orang	84 Orang	28.00 %
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	1175 orang	0 orang	150 orang	116 orang	77.33 %	90 orang	206 orang	17.53 %
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	6 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	33 %
						Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	6 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00 %	1 dokumen	2 dokumen	33 %

1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dok)	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	0 dokumen	0 dokumen	0 %
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	2700 orang	0 unit	450 Orang	834 Orang	185.33 %	262 orang	1,096 Orang	41 %
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk (Desa)	20 Desa	0 desa	0 desa	0 desa	#DIV/0! %	4 desa	4 desa	20 %
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dokumen)	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	1 dokumen	1 dokumen	50 %
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	136 unit	0 unit	20 unit	20 unit	100 %	47 unit	67 unit	49 %
1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (%)	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan (%)	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	33 %	33 %
1	05	03	2.05	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi (Lembaga)	1 Lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	#DIV/0! %	0 lembaga	0 lembaga	0 %
1	05	03	2.05	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun (Dokumen)	9 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	3 Dokumen	3 dokumen	33 %
1	05	03	2.05	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	16 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	#DIV/0! %	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 %
1	05	03	2.05	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan (unit)	7 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0! %	0 Unit	0 Unit	0 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang *ex officio* adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-	0.43	0.44	0.45	0.46	-	0.43	0.44	0.45	
2		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	18.05%	88.23%	92,16%	100%	
3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	14.41%	100%	100%	100%	
4		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

- ❖ Capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana”

Tabel. 1
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

Sasaran I :	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.44	0.44	100%

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Nilai Indeks Ketahanan Daerah”**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2022 adalah 0,44 dan realisasi 0,44 dengan persentase capaian kinerja 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian target tersebut diperoleh dari pengimputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data

2018-2022 yang dimutakhirkan setiap tahun, dan data tersebut bersumber dari OPD terkait seperti Bappelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DLH, Satpol PP, DAMKAR, TNI/POLRI dsb.

Pengumpulan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk penilaian kapasitas daerah secara mandiri melalui daring. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. **INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)** merupakan bagian **dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)**. IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. **IKD** aspek penting: merupakan komponen pada **kajian kapasitas** di dalam KRB **data input** dalam **perhitungan IRBI**. Penilaian IKD dilakukan dengan mekanisme 'pemutakhiran' bukan pengisian dari awal. Hasil penilaian akan diverifikasi oleh Provinsi dan BNPB, sehingga nilai bisa berubah. Nilai IKD yang baik adalah yang selalu meningkat, sehingga baseline yang rendah pun tidak masalah

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :

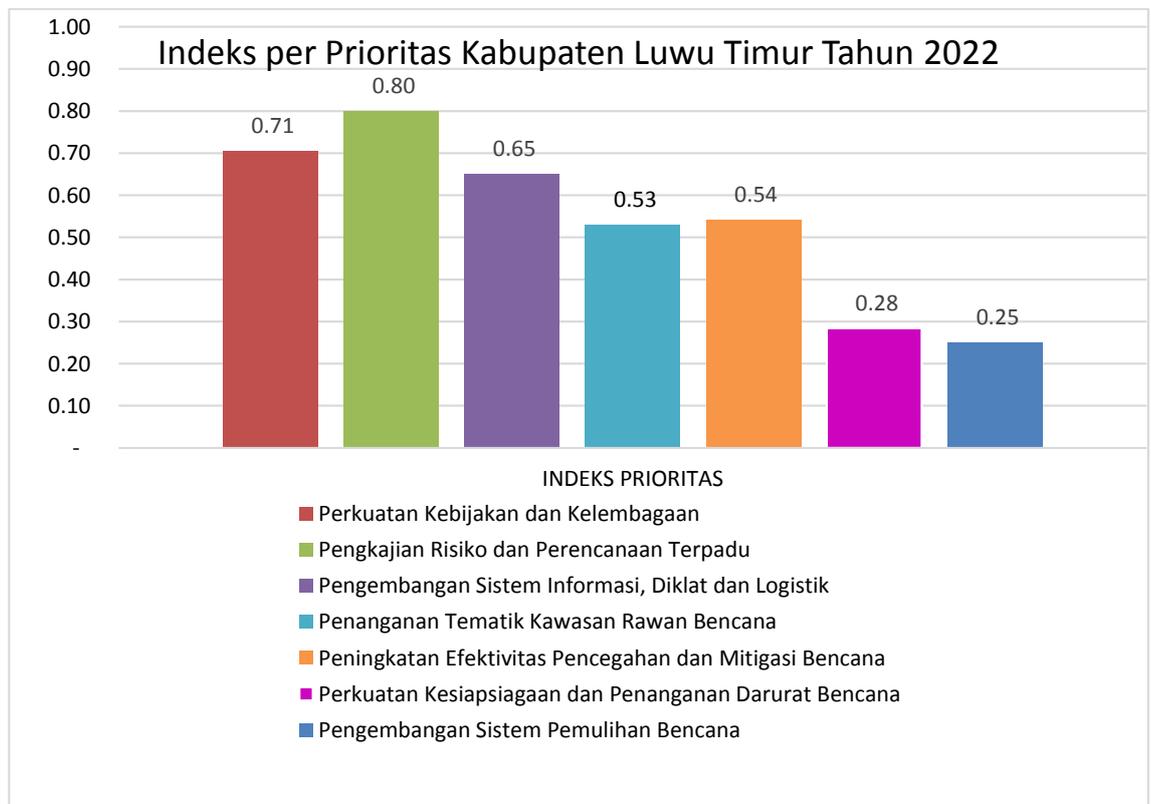
- Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
 - Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK BPBD
 - Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
 - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
 - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
 - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
 - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
 - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
 - Perbup BTT Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
 - Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
 - SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 094/Dinkes/115/XI/2022 tentang Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana
 - SK Bupati Luwu Timur Nomor 180/VII/Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
- PUSDALOPS BPBD
 - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun
 - Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD

- Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
 - Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu :
- Penataan Ruang berbasis PRB
 - Pembentukan Desa Tangguh Bencana
 - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospitasl Inco Soroako)
 - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
 - Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Luwu Timur
 - Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Desa
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
- Rehabilitasi tanggul sungai
 - Normalisasi/Restorasi sungai
 - Pembangunan Bendung Sungai
 - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
 - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
 - Pembangunan Embung
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu :
- Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
 - Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi
 - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
 - EWS INA Tews (Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang Berpotensi Tsunami)
 - Pelaksanaan Simulasi, Sosialisasi, Pelatihan, Gladi kesiapsiagaan
 - Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Himbuan Peringatan Bencana
 - RTD PT. Vale Indonesia mengenai kegagalan Bendungan
 - Penentuan Status Darurat Bencana
 - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
 - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
 - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
 - Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha

- Penghentian Status Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :
- Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana)
 - Bantuan Keuangan untuk korban bencana.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait kebencanaan yaitu Indeks Risiko Bencana, maka BPBD beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk menurunkan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur. Dan pada tahun 2022, Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur adalah 176,14 dari target 202, dengan persentase capaian 114,68%.

Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. **“Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun”**. IKD dan IRBI menjadi **RAPOR** bagi **Pemerintah Daerah** di bidang penanggulangan bencana.



Grafik. 5
Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2022

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.71	0.44	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.65		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.53		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.54		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.28		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.25		

Tabel. 2

Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2022

- Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu :
 - Program Penanggulangan Bencana :
 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

 - Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
 - Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
 - Belum maksimalnya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
 - Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik
 - Keterlambatan pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- Melakukan sosialisasi/lokakarya terkait IRB dan IKD
- Melakukan pemetaan terkait upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Luwu Timur
- Pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD sesuai timeline

➤ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2022, BNPB memfasilitasi logistik untuk korban bencana yaitu : Kidsware 5 paket, Paket Kebersihan keluarga 9 paket, Selimut 20 Lbr, Matras 20 Lbr, Perlengkapan Sekolah 15 paket, Ember 36 buah, Jerigen Lipat 30 buah, Masker Kain 3000 Pcs, Handsaniter isi 4 ltr sebanyak 8 Jerigen, Sabun Cair 24 Btl, APD 30 Pcs, Vitamin 300 tablet, Beras (49 karung), Mie Instant (50 dos), Air Mineral (45 dos), Logistik Pangan (27 paket), Perlengkapan Keluarga (35 paket), Perlengkapan Bayi (35 paket) dan Shelter Kit (15 paket).
- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD sendiri, juga difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dalam pencapaian target program prioritas Kepala Daerah yaitu MITIGASI BENCANA, realisasi dapat diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan di Desa melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dilaksanakan oleh 115 desa di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Sosialisasi rawan bencana, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi, Kajian Risiko Bencana

Desa dsb. Capaian kinerja tersebut juga berdampak kepada Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

- Dalam pelaksanaan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, capaian kinerja melebihi dari target yang direncanakan, dari target 250 org dan terealisasi 262 org serta pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana karena adanya dukungan makanan dan minuman dari PT. Vale Indonesia dan sehingga dalam pelaksanaan gladi dapat melibatkan banyak orang, dan hal ini berimplikasi terhadap capaian SPM urusan bencana.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut. Dan penyebarluasan informasi kebencanaan juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu PUSDALOPS BPBD.
- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 40 orang yang terdiri dari 13 orang PNS, 3 orang Upah Jasa, dan 24 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas

Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.

- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada. Dan pada tahun 2022, telah dilakukan pengajuan Proposal Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui e-proposal, dan sampai dengan bulan Desember 2022 telah rampung dan menunggu verifikasi oleh BNPB.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,44	0,44	100%	1.612.510.342	1.342.102.151	83,23 %
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	92,16%	92,16%	72.518.925,-	71.572.000,-	98,69 %
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	631.718.507,-	507.998.624,-	80,41 %
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	908.272.910,-	762.531.527	83,95 %

Tabel. 4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100%	83,23%	16,77%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 83,23%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 16,77%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

- Adanya Data Base berdasarkan hasil penilaian Kota Tangguh Bencana pada Tahun 2018 yang dimutakhirkan setiap tahun.
- Telah dilakukan penginputan data IKD Kabupaten Luwu Timur pada bulan Nopember 2022 oleh BPBD Propinsi Sul-Sel.
- Terdapat beberapa Rekomendasi pada penilaian IKD sebelumnya yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Banjir, Renkon Gempa Bumi, Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026.
- Adanya supporting data dari OPD terkait.
- Pelaksanaan FGD terkait Penilaian IKD Kabupaten Luwu Timur

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Tabel. 5
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana									Target Tahun 2026
	Tahun 2018			Tahun 2021			Tahun 2022			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,42	100 %	0,43	0,43	100 %	0,44	0,44	100 %	0.50 (sedang)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan target setiap tahun. Target yang ditetapkan untuk tahun 2022 lebih tinggi dari target tahun 2021 dan terealisasi 100%. Ini berarti bahwa telah ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Target yang meningkat dengan capaiannya 100% karena dari 71 indikator yang menjadi penilaian dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa indikator yang terpenuhi misalnya Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa, Kajian Risiko Bencana telah terintegrasi dalam penyusunan RTRW dan RDTR beberapa kecamatan, telah dilakukan Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, terbentuknya beberapa Desa Tangguh Bencana, adanya Satuan Pendidikan Aman Bencana dsb.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah setiap tahunnya, agar 7 prioritas dengan 71 indikator dapat dipenuhi secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2022 dengan target jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 – 2026)

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana			Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2022 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				
	Tahun 2021	Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,43	0,44	0,44	0,50 (sedang)	87%

4. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun **Target nasional** dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah **100% setiap tahun**. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 7

Target SPM Capaian Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

Tabel. 8

Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			Anggaran		(%)
		Indikator Capaian	Target (%)	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	92,16%	72,518,925,-	71.572.000,-	98,69%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	551,756,790,-	441,140,000,-	79,95%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	908,272,910,-	762,531,527,-	89,95%

Tabel. 9
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Alokasi Biaya		
			Anggaran		
			APBN	APBD	Sumber dana lain yang sah
1	2	3	4	5	6
		Program Penanggulangan Bencana		1.532.548.625,-	
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	72.518.925,-	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	72.518.925,-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	551.756.790,-	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	76.939.270,-	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	58.000.000,-	-
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	128,622,720,-	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	-	64.014.850,-	-
		Penyusunan Rencana Kontijensi	-	191.799.980,-	-
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	32.379.970,-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	908.272.910,-	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	665.091.800,-	-
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	69.477.500,-	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	85.422.750,-	-
		Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	-	29.254.820,-	-
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/ Wabah Penyakit	-	59.026.040,-	-

Tabel. 10
Kendala, Permasalahan dan Solusi
SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana, (2). Terdapat Papan Hibauan Informasi Bencana di 2 Kecamatan dalam kondisi rusak berat. (3). Sub Kegiatan Sosialisasi , komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana telah dilaksanakan pada triwulan II TA. 2022, namun dari target 300 org yang terealisasi hanya 262 org	(1).Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Hibauan Peringatan Dini dan Media Sosial, (2).Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, (3).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, (2).Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1).Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2).Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, (3).Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	(1).Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, (2).Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, (3).Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, (4). Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

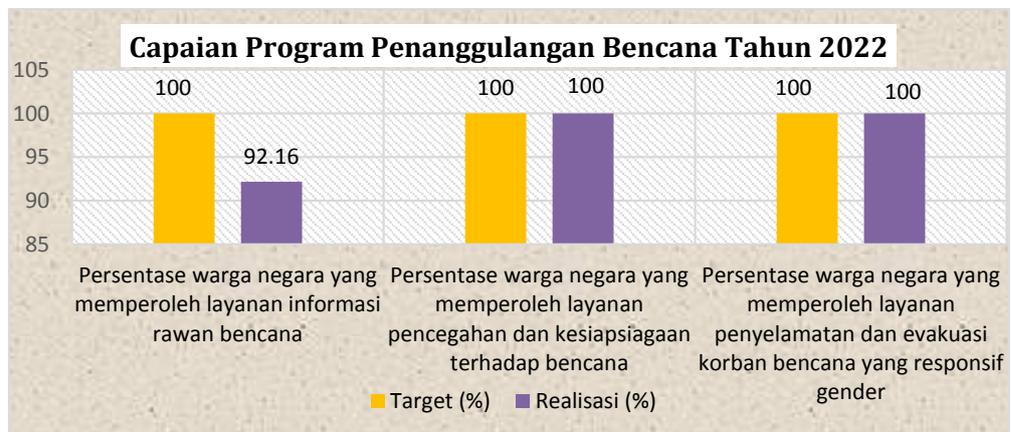
❖ Program Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan program penanggulangan bencana yaitu : memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran program adalah : (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

✚ Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana (outcome)



Grafik. 6

Capaian Kinerja Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2022

Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2022 adalah :

1. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : *“Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.*

Target kinerja tahun 2022 adalah 100% dan terealisasi 92,16% dengan persentase capaian kinerja sebesar 92,16%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan melalui pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 262 org, PUSDALOPS BPBD 6.002 org, Papan himbauan informasi bencana di 9 kecamatan 234.687 org dan Rambu evakuasi di 8 desa di Kec. Malili 26.578 org, Workshop Mitigasi Bencana sebanyak 124 org dan pelaksanaan mitigasi bencana Desa Nuha dan Matano (2.525 org), dan melaksanakan mitigasi bencana (sosialisasi) di 17 desa di kec. Towuti (41.135 org) dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 278.347 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki papan himbauan karena kondisi papan himbauan yang sebelumnya rusak berat.

2. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : *“Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.*

Target kinerja tahun 2022 adalah 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%, capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (Pelatihan TRC) sebanyak 40 org, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi sebanyak 90 org, Sekolah Lapang Gempa Bumi sebanyak 50 org dan BMKG Goes To School sebanyak 300 org, pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 262 org. Selain itu terdapat penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat Ina TEWS

untuk mendeteksi gempa bumi yang disebabkan oleh sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi : “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah seluruh keseluruhan korban bencana dikali seratus”.

Target kinerja Tahun 2022 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 607 jiwa (313 laki-laki dan 294 perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total korban bencana dari 315 kejadian bencana yang terjadi di Kab. Luwu Timur.

Pada tahun 2022, Program Penanggulangan Bencana didukung oleh 3 kegiatan Utama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Tabel. 11
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,09%	0,09 %	100%
a.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	262 org	262 org	100%

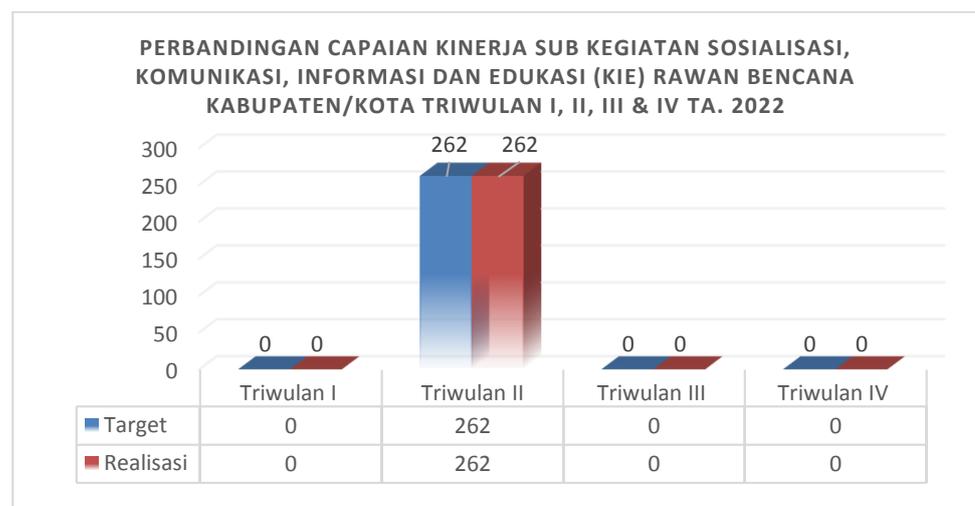
Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi rawan bencana agar warga negara lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada diwilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard/bahaya) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Indikator kegiatan adalah Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan **Formulasi** : *Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus*. Target Tahun 2022 adalah 0,09% (262 org) dan realisasi 0,09% (262 org) dengan persentase capaian kinerja 100%.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota**



Grafik. 7
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 262 orang dan realisasi 262 orang, persentase capaian 100%. Capaian kinerja mencapai 100% karena dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran, disesuaikan dengan jumlah peserta sosialisasi yang hadir, begitu juga dengan anggarannya. Sub kegiatan dilaksanakan di 3 zona dan peserta berasal dari 11 kecamatan. Peserta terdiri dari Guru SD, SMP dan SMA dengan pertimbangan bahwa informasi kebencanaan yang diperoleh dapat diteruskan ke tingkat sekolah. Disediakan anggaran sebesar Rp. 72.518.925,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.572.000,- atau sebesar 98,69%.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel. 12
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2,117%	2.118%	100,05%
			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100%	100%	100%
a.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparatur dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 org	90 org	90%
b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	47 unit	47 unit	100%
c.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	4 Desa	4 Desa	100%

d.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%
		Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana	Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%
e.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	40 org	40 org	100%
f.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya data/informai tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1 Dok	1 Dok	100%
g.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	250 org	262 org	104,8%

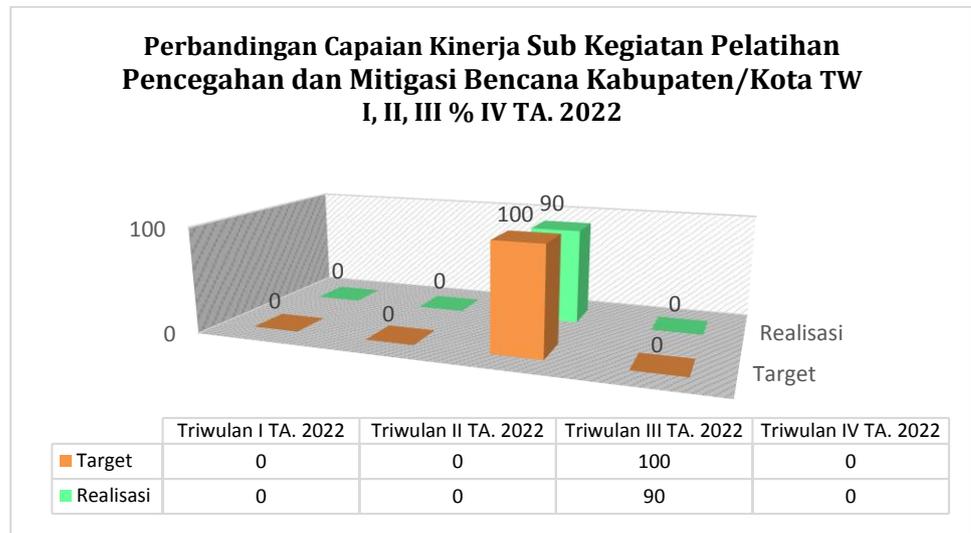
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

Indikator kegiatan adalah (1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun. *Adapun formulasinya adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi jumlah seluruh warga negara dan aparatur yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus.* Target dari indikator 1 adalah 2,117% (6.397 org) dan realisasi 2,118% (6.399 org) dengan persentase capaian kinerja 100,05%. Sedangkan target indikator 2 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Pencapaian target kegiatan didukung oleh :

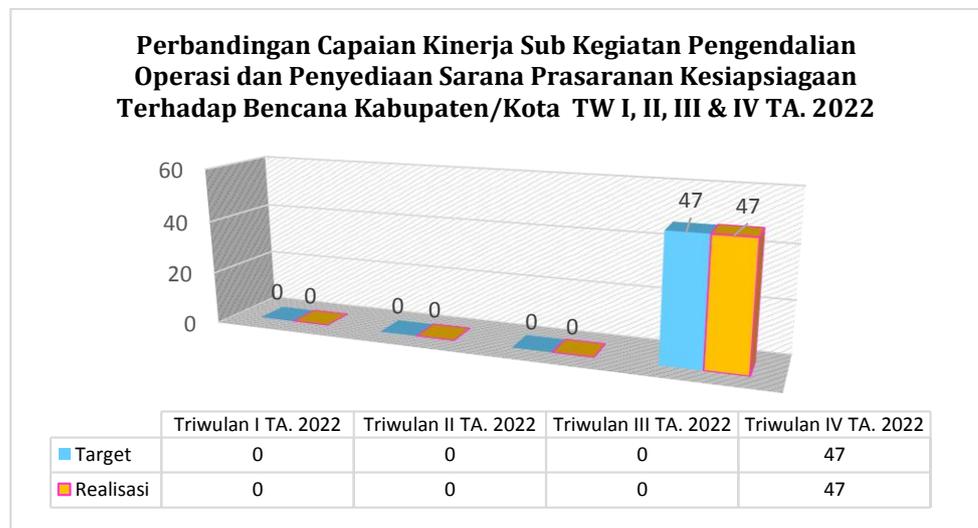
- **Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**



Grafik. 8
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dengan target 100 orang dan realisasi 90 orang dengan persentase capaian kinerja 90%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena beberapa peserta tidak sempat hadir karena bertepatan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan di akhir tahun. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 September 2022 dan dihadiri oleh Kepala Sekolah tingkat SD dan SLTP dari 11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 76.939.270,- dan realisasi keuangan Rp. 69.001.000,- atau sebesar 81,60 %. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 7.938.270,- karena jumlah peserta yang hadir tidak sesuai target, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta pelatihan. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai dengan target yang telah direncanakan.

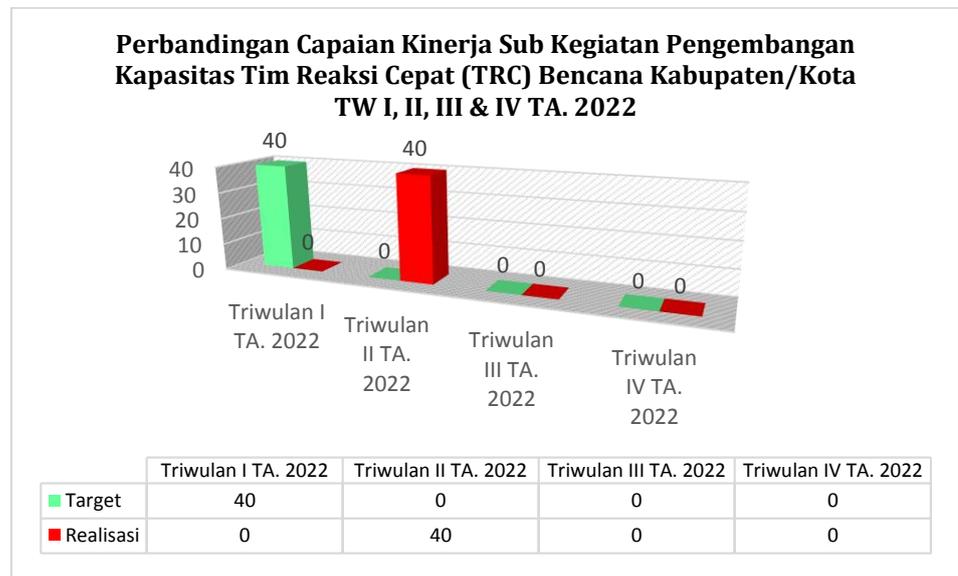
- **Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota**



Grafik. 9
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 47 unit realisasi 47 unit, persentase capaian kinerja 100%. Adapun sarana dan prasarana yang diadakan yaitu pengadaan Life Jacket (pelampung) 45 unit dan Chainsaw 2 unit. Pengadaan ini baru dilaksanakan pada Triwulan IV TA. 2022 karena adanya perubahan target yang semula untuk pengadaan kantung jenazah, namun karena ketersediaannya masih mencukupi sedangkan yang mendesak dan sangat dibutuhkan adalah chainsaw dan life jacket untuk penyelamatan dan evakuasi. Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 58.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 52.836.000,- atau sebesar 91,10% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.164.000,- yang merupakan sisa belanja (sisa SPK).

- **Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota**

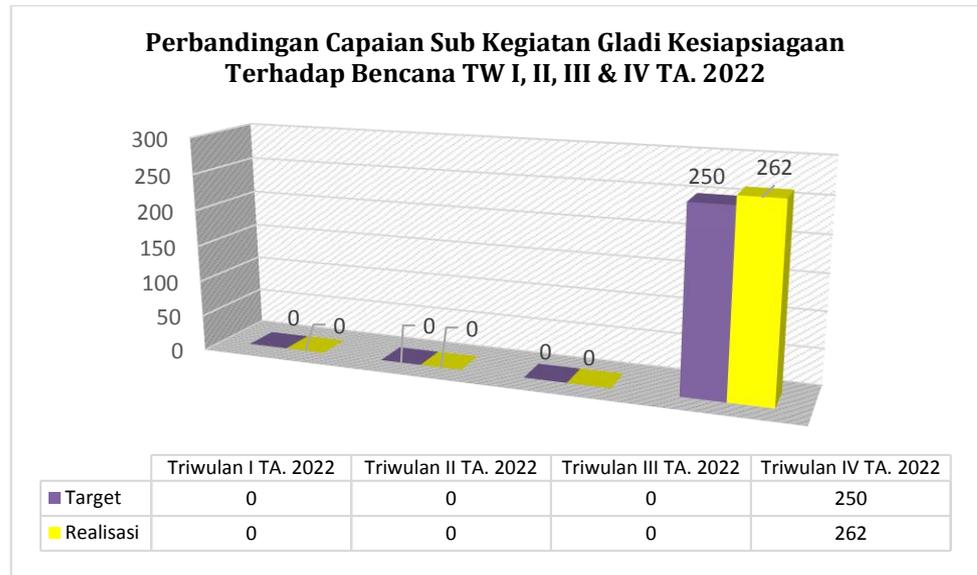


Grafik. 10

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat dengan target 40 orang dan realisasi 40 orang dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja mencapai 100% karena dilakukan perubahan target kinerja dan keuangan pada saat perubahan anggaran. Jenis pelatihan yang diberikan adalah Teknik Penyelamatan di Hutan (Jungle Rescue) dengan instruktur dari BASARNAS (Koord. Pos SAR Unit Siaga Luwu Timur). Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan I, namun baru terlaksana pada Triwulan II karena terkendala keterlambatan pengadaan perlengkapan untuk pelatihan. Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 64.014.850 dan realisasi keuangan Rp. 59.223.000,- (92,51%). Terdapat sisa anggaran sewa penginapan/hotel dan perjalanan dinas, yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan.

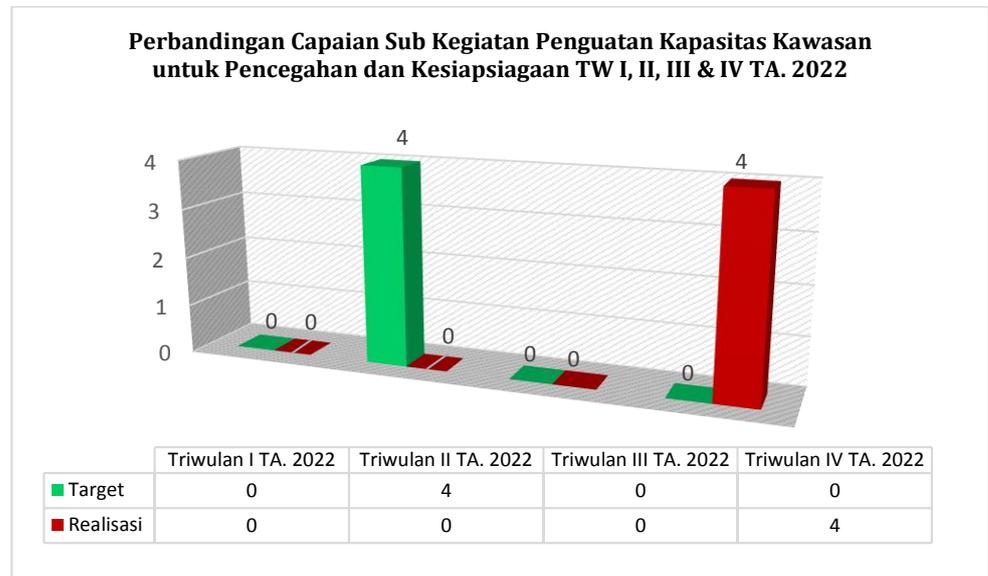
- **Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**



Grafik. 11
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 250 orang dan realisasi 262 orang dengan persentase capaian kinerja 104,80%. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan IV TA. 2022. Capaian kinerja melebihi target karena pelaksanaan kegiatan dirangkaikan dengan gelar pasukan yang diadakan oleh TNI/POLRI secara serentak. Realisasi Sub kegiatan ini terdiri dari Apel Siaga Bencana dengan jumlah peserta 262 org dan Simulasi yang dilaksanakan di SDN 226 Patande. Peserta gladi/apel siaga bencana yaitu TNI/POLRI, Satpol, Damkar, PT. Vale Indonesia Tbk (Fire), Senkom, Tagana, Bela Negara, PMI, SAR, Basarnas, Dishub, Manggala Agni, TRC BPBD, Dinkes. Berdasarkan Anggaran Kas Tahun 2022 kegiatan dilaksanakan pada Triwulan IV sebesar Rp. 32.379.970,- dan realisasi keuangan Rp. 32.233.200,- atau sebesar 99,55%. Kegiatan tersebut juga bisa terlaksana dengan sukses berkat adanya dukungan dari dunia usaha yaitu PT. Vale Indonesia Tbk.

- **Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

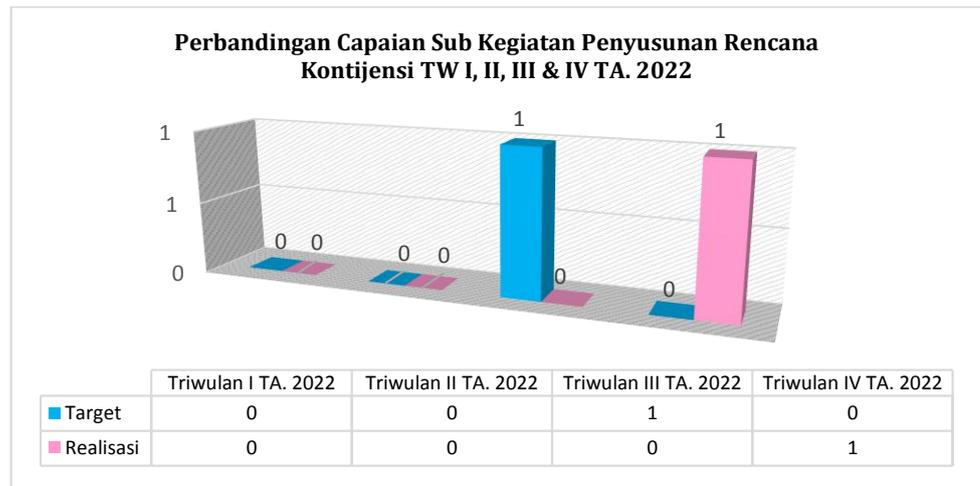


Grafik. 12

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk dengan target 4 Desa dan realisasi 4 Desa dengan persentase capaian kinerja 100%. Berdasarkan rencana aksi, output sub kegiatan ditargetkan pada Triwulan II TA. 2022. Namun baru terealisasi pada triwulan IV. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian jadwal narasumber. Adapun Destana yang dibentuk yaitu Desa Batu Putih Kec. Burau, Desa Ujung Baru Kec. Tomoni, Desa Maliwowo Kec. Angkona dan Desa Ussu Kec. Malili. Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 128.622.720,- dan realisasi keuangan Rp. 91.815.650,- atau sebesar 71,38 %. Realisasi keuangan tidak sesuai target karena terdapat tahapan pada kegiatan Penilaian IKD yaitu Tahapan sosialisasi tidak dilakukan karena terkendala ketersediaan waktu narasumber, sehingga pelaksanaannya langsung pada penilaian IKD sehingga mempengaruhi realisasi keuangan. Dalam sub kegiatan ini terdapat 2 uraian kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembentukan DESTANA dan Penilaian IKD.

- **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi**

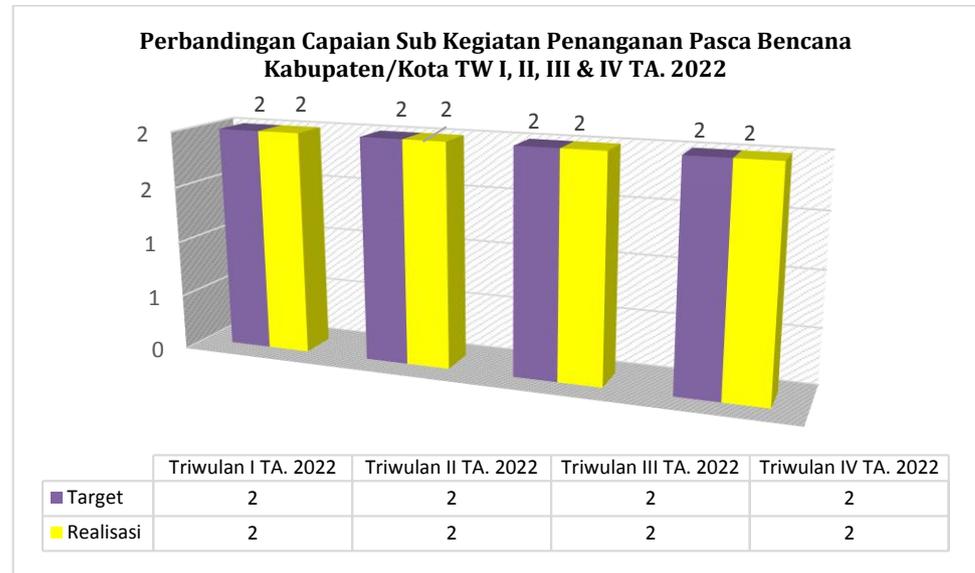


Grafik. 13
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Berdasarkan rencana aksi, output sub kegiatan ditargetkan pada Triwulan III TA. 2022. Namun baru terealisasi pada triwulan IV. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian jadwal Tenaga Ahli/narasumber yang mempunyai pekerjaan di Kabupaten lain selain Kab. Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Renkon yaitu : Pertemuan tim persiapan penyusunan dokumen renkon, Lokakarya/Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Renkon, Pertemuan Tim Penyusunan Draft Awal Dokumen dan pemetaan, Identifikasi dan pengelolaan data, Lokakarya (FGD), Pengumpulan Data dan Penyusunan Draft Dokumen Renkon Skenario Kejadian, Sumber Daya dan Struktur Komando, Lokakarya Pemaparan Draft Dokumen & Peta Lokasi Evakuasi Renkon, Pertemuan Tim Revisi Dokumen dan Peta Pendukung, Revisi Akhir dan Finalisasi Dokumen Renkon, dan pelaksanaan Simulasi gempa bumi. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp. 191.799.980,- dan realisasi keuangan Rp. 136.031.150,- atau sebesar 70,92%. Realisasi kurang dari target karena pembayaran honor tenaga ahli untuk 5 org dan terealisasi hanya 4 org, sedangkan pada beberapa tahapan dalam penyusunan Renkon, narasumber yang hadir hanya 3 org, sehingga biaya

transportasi dan sewa hotel disesuaikan dengan jumlah narasumber yang hadir, dan hal ini mempengaruhi realisasi keuangan.

- **Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota**



Grafik. 14

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang disusun dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen, persentase capaian kinerja 100%. Dokumen tersebut berisi rekomendasi usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan hasil identifikasi, dan akan diteruskan ke OPD terkait yang menangani ataupun dapat diusulkan ke BNPB (Dana Hibah RR) melalui proposal. Selain penanganan pasca bencana, hasil identifikasi juga diarahkan untuk penanganan mitigasi bencana untuk wilayah yang berpotensi bencana, sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin. Pada tahun 2022, telah dilakukan rekonstruksi sektor permukiman terhadap korban kebakaran terdampak bencana sebanyak 18 Rumah dan Telah dilakukan rehabilitasi sektor permukiman terhadap korban terdampak bencana cuaca ekstrim sebanyak 43 Rumah. Telah diajukan Proposal bantuan dana hibah pascabencana Tahun 2022 telah rampung dan menunggu verifikasi oleh BNPB. Disediakan anggaran sebesar Rp 59.971.628,- yang terdiri dari belanja ATK Rp. 2.266.628, Belanja Perjalanan Dinas Rp. 55.160.000,- dan Belanja makan minum rapat Rp 1.645.000,- dan belanja penggandaan Rp. 900.000,- Realisasi 99,43% terdiri dari

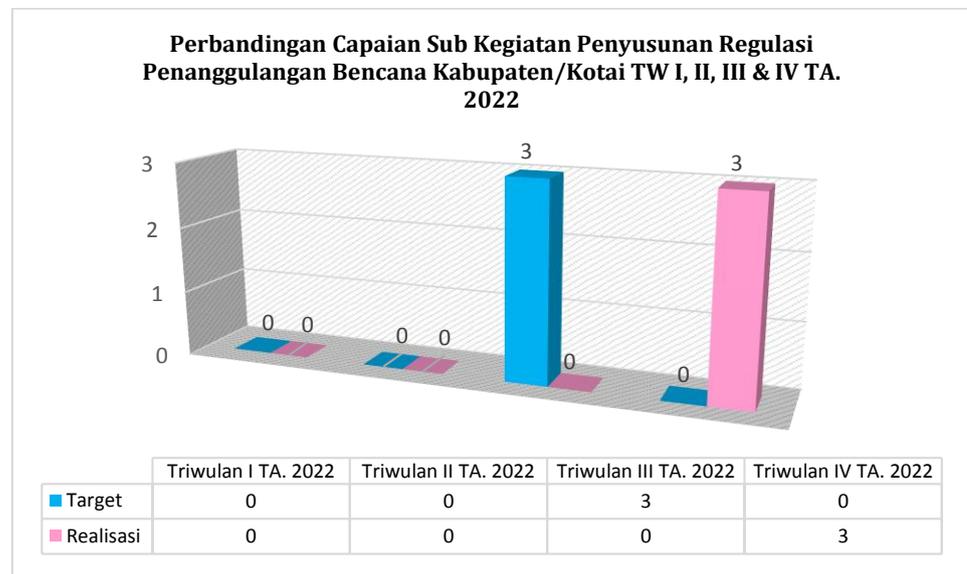
Belanja ATK Rp. 2.260.000,- , Belanja Perjalanan Dinas Rp. 54.847.724,-, Belanja penggandaan sebesar Rp. 899.700,-, dan makan minum tidak terealisasi karena anggaran ini sifatnya disiapkan untuk kegiatan rapat koordinasi pascabencana dengan OPD terkait.

3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Tabel. 18
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar	Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	100%	100 %	100%
a.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi penanggulanga bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	3 Dok	3 Dok	100%

- Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota



Grafik. 15
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun dengan target 3 dokumen dan realisasi 3

dokumen, persentase capaian kinerja 100%. Adapun target yang direncanakan adalah penyusunan Perbup dan SOP, yang terealisasi hanya SOP. Hal ini disebabkan karena Direncanakana penyusunan SOP dan Perbup untuk dokumen Renkon. Namun yang terealisasi hanya SOP, sedangkan Perbup Renkon tertunda pelaksanaannya karena dokumen yang direncanakan untuk dilakukan penyusunan Perbup, baru rampung diakhir tahun. Disediakan anggaran kas pada Triwulan IV sebesar Rp. 19.990.089,- dan realisasi sebesar Rp 8.851.200,- atau 44,28%.

4. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel. 13
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100 %	100%
a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%
b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%
c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%	100%	100%
d.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%	100%	100%

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman. Dengan dasar pemikiran bahwa keselamatan jiwa manusia

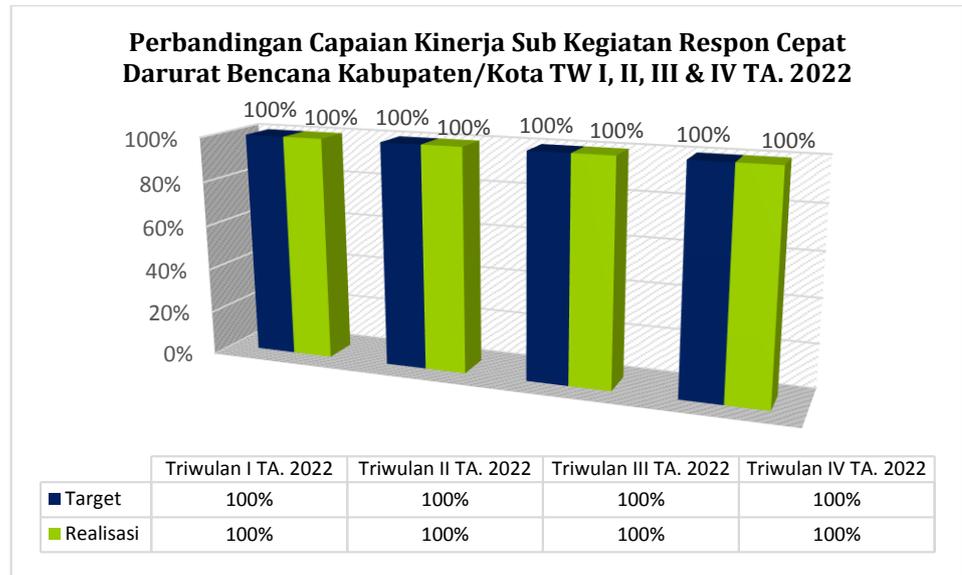
sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

Kegiatan ini bertujuan untuk : (1) menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau dikhawatirkan akan hilang akibat bencana, (2) Menolong korban bencana yang sakit akibat bencana, (3) Menindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman.

Indikator kegiatan adalah Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender dengan **Formulasi** : Jumlah korban bencana yang dicari, ditolong dan dievakuasi dibagi jumlah perkiraan korban bencana dikali seratus dengan target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja 100% karena berdasarkan jumlah kejadian bencana pada bulan Januari s.d Desember tahun 2022, terdapat 607 jiwa korban terdampak (313 laki-laki dan 294 perempuan), dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dan semua kejadian bencana yang terjadi, direspon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Dari 315 kejadian terdapat 6 kejadian orang hilang/tenggelam yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 246 kejadian (gempa bumi) dilakukan pengecekan data pada Sistem WRS (Warning Receiver System) dan dilaporkan ke pusat dan propinsi melalui PUSDALOPS BPBD. Cuaca ekstrim (angin kencang) 21 kejadian, Longsor 6 kejadian dan Kebakaran rumah 12 kejadian, difasilitasi dengan penyaluran bantuan logistik dan memperoleh Dana BTT untuk korban bencana. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian bencana yang terjadi.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

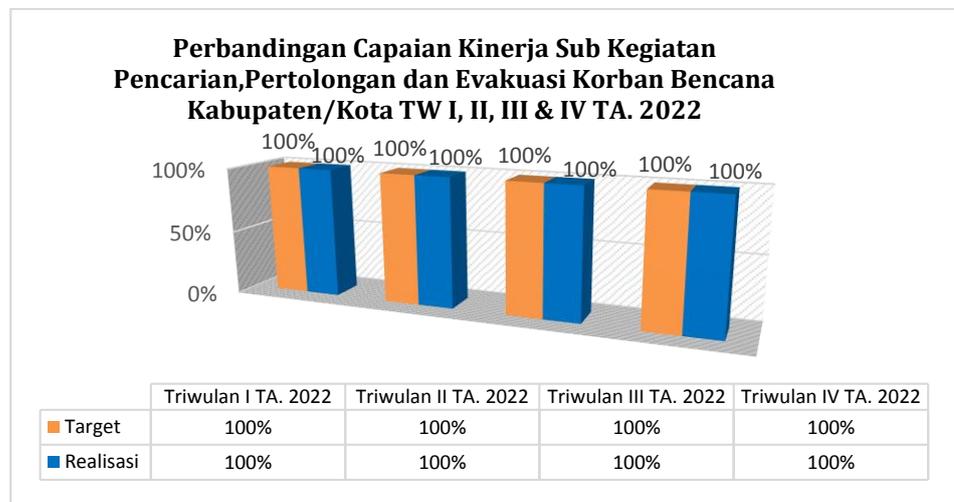
- **Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota**



Grafik. 16
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah : Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Desember 2022 yaitu 315 kejadian yaitu Banjir 6 kejadian, orang hilang/tenggelam 6 kejadian, kebakaran rumah 12 kejadian, kebakaran lahan 18 kejadian, cuaca ekstrim 21 kejadian, longsor 6 kejadian dan gempa bumi 246 kejadian dan semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat BPBD. Disediakan anggaran sampai triwulan IV sebesar Rp 665.091.800,- Terealisasi sebesar Rp. 615.551.400,- atau sebesar 92.55%. Anggaran sub kegiatan Tidak terealisasi 100 % disebabkan jumlah personil TRC hingga saat ini berjumlah 24 orang dari estimasi anggaran yang disediakan untuk 25 orang. Hal tersebut mempengaruhi realisasi anggaran khususnya Belanja Makan minum aktivitas lapangan dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Gaji upah Jasa TRC).

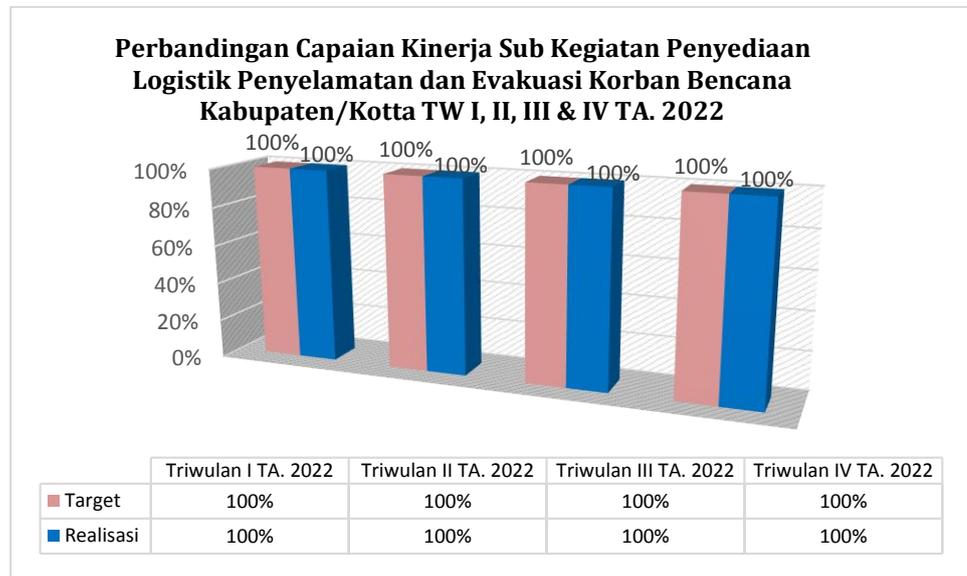
- **Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**



Grafik. 17
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman. **Indikator sub kegiatan adalah** Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 607 jiwa dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Disediakan anggaran sampai pada triwulan IV sebesar Rp 69.477.500,- dengan realiasi Rp. 62.161.700,- atau sebesar 89,47%. Terdapat sisa anggaran cukup besar pada Belanja Perjalanan Dinas yaitu Rp. 4.104.450,-. Anggaran ini sifatnya disediakan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim diakhir tahun berdasarkan informasi kebencanaan yang ada dan penggunaannya disesuaikan dengan kejadian bencana.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**



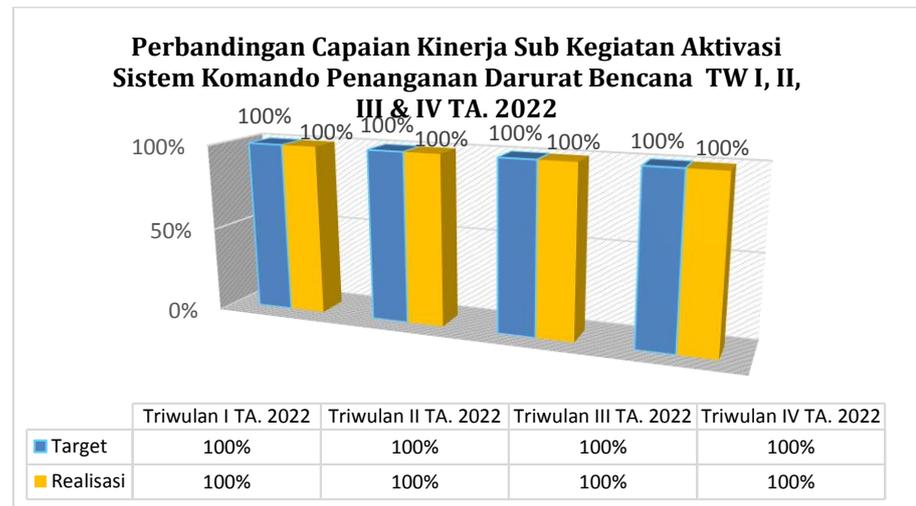
Grafik. 18
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti hunian sementara (tenda), sandang, pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan sanitasi serta kebutuhan dasar lainnya

Indikator sub kegiatan adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 607 jiwa, dari jumlah tersebut, sebanyak 599 jiwa yang memerlukan bantuan logistik sedangkan selebihnya yaitu 8 org (korban org hilang/tenggelam) hanya diberikan bantuan pertolongan dan evakuasi. Bantuan logistik yang diberikan berupa sandang pangan maupun hunian sementara (tenda). Disediakan anggaran sampai pada triwulan IV sebesar Rp 85.422.750,- dengan realisasi Rp. 66.851.027,- atau 78,26 %. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena pada tahun 2022, tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan pembiayaan yang signifikan, disamping itu terdapat bantuan logistik penanggulangan bencana dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang diantar langsung oleh Tim, sehingga terdapat efisiensi Belanja Bahan

Pangan sebesar Rp.9.637.000,- dan Belanja Paket/Pengiriman Logistik sebesar Rp. 3.000.000,- serta Belanja Sewa Mobilitas Darat Rp 4.000.000,- . Jenis bantuan logistik yang diperoleh dari propinsi yaitu : Kidsware (5 paket), Paket Kebersihan Keluarga (9 paket), Selimut (20 lbr), Matras (20 lbr), Perlengkapan Sekolah (15 paket), Ember (36 buah), Jerigen Lipat (30 buah), Masker Kain (3000 pcs), Handsanitizer 4 ltr (8 jerigen), Sabun Cair (24 botol), APD (30 buah) dan Vitamin (300 tablet), Beras (49 karung), Mie Instanst (50 dos), air mineral (45 dos), Logistik Pangan (27 paket), Perlengkapan Keluarga (35 paket), Perlengkapan Bayi (35 paket), dan Shelter Kid (15 paket).

- **Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana**

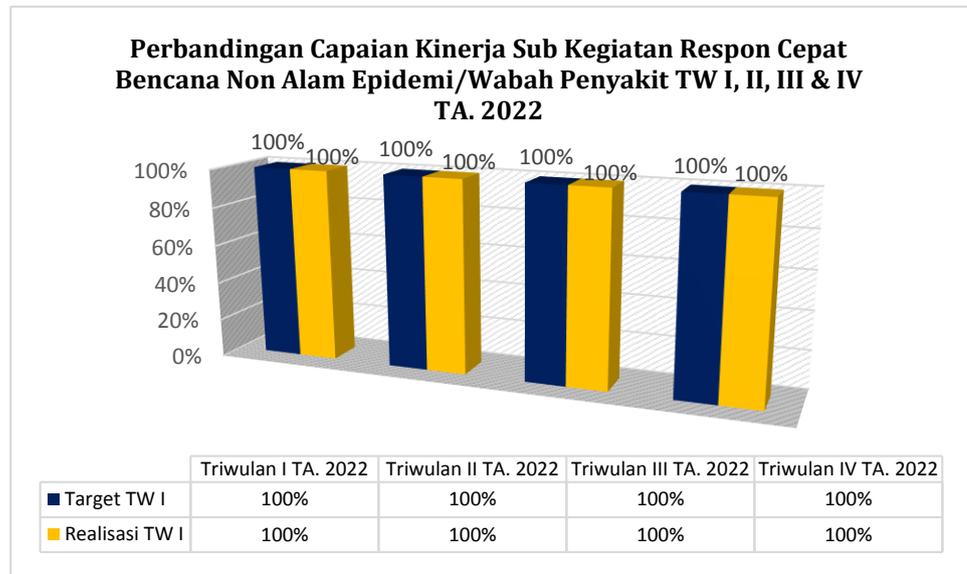


Grafik. 19
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam menyiapkan petugas penanganan darurat bencana pada bulan januari s.d September 2022 sebanyak 40 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana. Disediakan anggaran sebesar Rp 29.254.820,- Namun realisasi keuangan hanya sebesar Rp. 700.000,-, hal ini disebabkan karena sampai akhir tahun 2022, tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan aktivasi sistem

komando penanganan darurat bencana. Namun anggaran tetap disediakan untuk mengantisipasi kejadian darurat bencana di akhir tahun.

- **Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit**

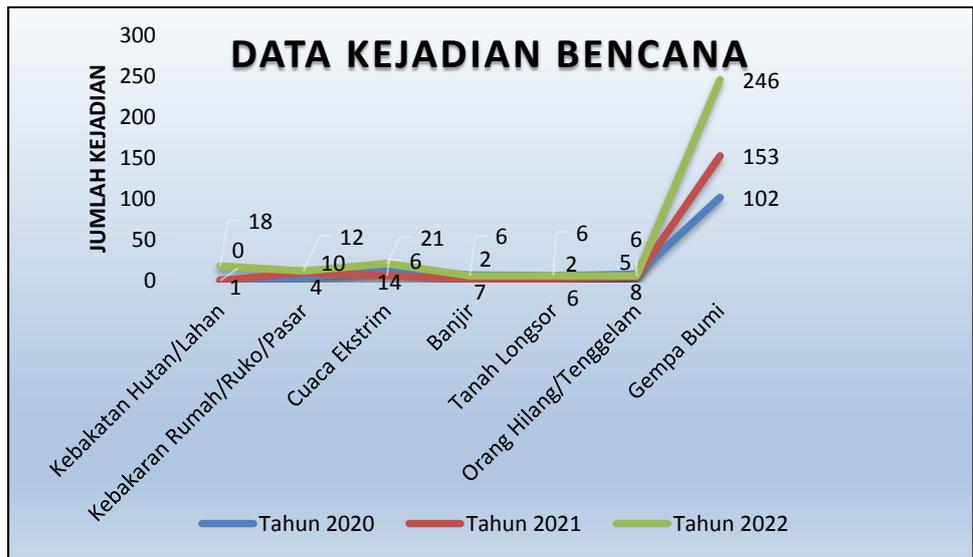


Grafik. 20
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator sub kegiatan adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam (covid-19) yang ditangani oleh BPBD terkait giat pemulasaran jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. Adapun jumlah masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) sebanyak 14 jiwa dan dilakukan respon cepat pemulasaran kurang dari 24 jam setiap informasi yang diterima oleh TRC BPBD. Disediakan anggaran sebesar Rp 59.026.040,- dengan realisasi Rp 17.267.400,- atau 38,79%. Realisasi keuangan yang rendah disebabkan karena jumlah kejadian akibat Covid 19 mulai menurun dan bahkan pada bulan mei s.d Desember 2022 tidak terdapat kejadian bencana akibat Covid 19. Namun demikian, anggaran tetap disediakan untuk mengantisipasi kejadian diakhir tahun.



Grafik. 21
Data Kejadian Bencana Januari s.d Desember Tahun 2022



Grafik. 22
Perbandingan Data Kejadian Bencana Tahun 2020 s.d 2022

SASARAN 2 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “**Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**” tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Notifikasi
	Tahun 2022			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	106,5%	112,11%	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran penunjang adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “**Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus**”.

Target Indikator sasaran penunjang Tahun 2022 adalah 95% dan realisasi 106,5% dengan persentase capaian kinerja 112,11%. Persentase capaian melebihi dari target karena terdapat kegiatan yang realisasinya lebih dari yang direncanakan sehingga menutupi kegiatan yang realisasinya < 100% yaitu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Hal inilah yang mempengaruhi realisasi kinerja secara keseluruhan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Terdapat jabatan fungsional penyetaraan dan jabatan pelaksana (pengurus barang) yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- Keterlambatan proses administrasi keuangan
- Keterbatasan personil pengelola kegiatan/sub kegiatan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa
- Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
- Percepatan proses administrasi keuangan
- Melakukan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan pada perubahan anggaran
- Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Mencermati sub kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
- Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor yaitu, untuk biaya WIFI Kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO
- Efisiensi anggaran belanja sandang pangan (logistik korban bencana) dan biaya paket pengiriman logistik.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel. 15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisas	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	106,5%	112,11%	2.831.939.699,-	2.632.151.887,-	92.95%
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	106,5%	112,11%	2.831.939.699,-	2.632.151.887,-	92.95%

Tabel. 16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	112,11%	92,95%	7,05%

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 112,11% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,95%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 7,05%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 17
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Pendukung	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah									Target Tahun 2026
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	101,87 %	101,87 %	95 %	102,94 %	108,36 %	95 %	106,5 %	112,11 %	100%

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya melebihi dari target seperti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Terdapat harga satuan sesuai dengan SBM untuk 1 unit peralatan, tetapi dapat membiayai lebih dari beberapa unit peralatan misalnya pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
3. Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, banyak diklat/pelatihan yang diikuti tetapi pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara
4. Beberapa kegiatan seperti Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan beberapa kegiatan lainnya tercapai sesuai target

Namun terdapat pula kendala dalam pencapaian target kinerja tahun 2022 yaitu

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena terkendala harga di e-catalog yang lebih tinggi dari harga toko sehingga metode pembeliannya dilakukan melalui mbizmarket.
- b. Terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tidak terealisasi karena terkendala jasa konsultan yang terbatas serta kurangnya minat karena pagu anggaran yang sangat minim. Disamping itu besaran jasa konsultan masih dibawah besaran remunerasi
- c. Beberapa sub kegiatan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik yang sifatnya disediakan, sehingga realisasinya disesuaikan dengan kejadian bencana
- d. Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi keuangan (SPJ).

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 18
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 - 2026)

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2021 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				
	Tahun 2021	Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022		
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	102,94%	106,5%	104,72%	100%	104,72%

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 19
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

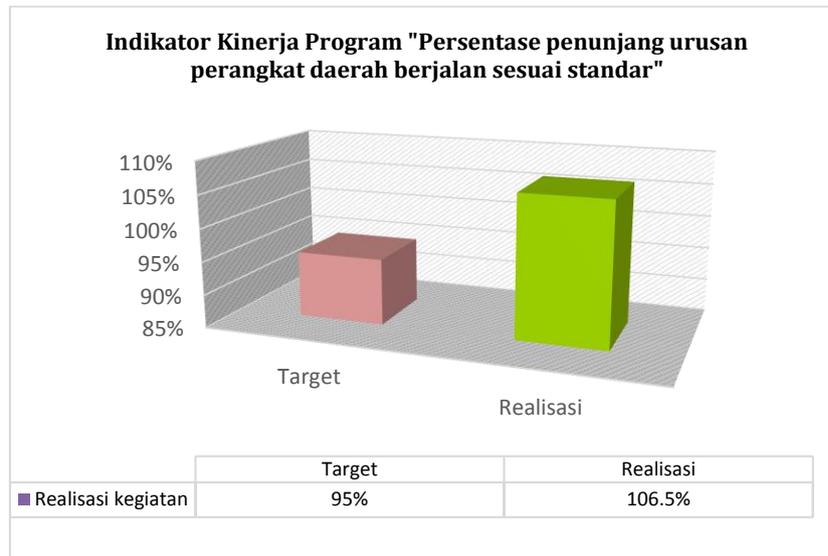
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
i.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	106,5%	112,11%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja	Tersedianya laporan	Jumlah laporan	10 Dok	10 Dok	100%

	Perangkat Daerah	kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	93,33%	93,33%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	15 Org	13 Org	86,67%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	166,66%	166,66%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Org	25 Org	166,66%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100,4%	100,4%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	100%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan	Terfasilitasinya	Jumlah tamu yang	275 Org	275 Org	100%

	Tamu	makanan dan minuman untuk tamu	difasilitasi kunjungannya			
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	69 Kali	71 Kali	102,90%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	66,66%	66,66%
a.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah mebel yang diadakan	4 Unit	4 Unit	100%
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	13 Unit	13 Unit	100%
c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah pengadaan 70gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	0 Unit	0%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	111,91%	111,91%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	400 Surat	543 Surat	135,75%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	36 Rek	36 Rek	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	113,6%	113,6%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	12 Unit	92,3%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	52 Unit	148,57%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran**

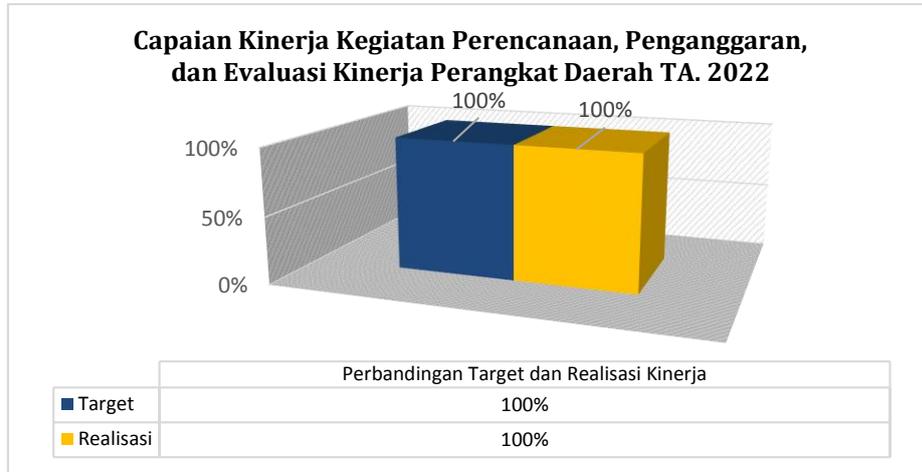
1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**



Grafik. 23
Perbandingan Target dan realisasi Tahun 2022

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus**. Target 95% dan realisasi 106,5% dengan capaian kinerja 112,11%, dan menyerap anggaran sebesar 92,95%. Capaian kinerja program melebihi target karena terdapat beberapa kegiatan capaian kinerjanya >100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan yaitu :

➤ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**



Grafik. 24
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 10 dokumen. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

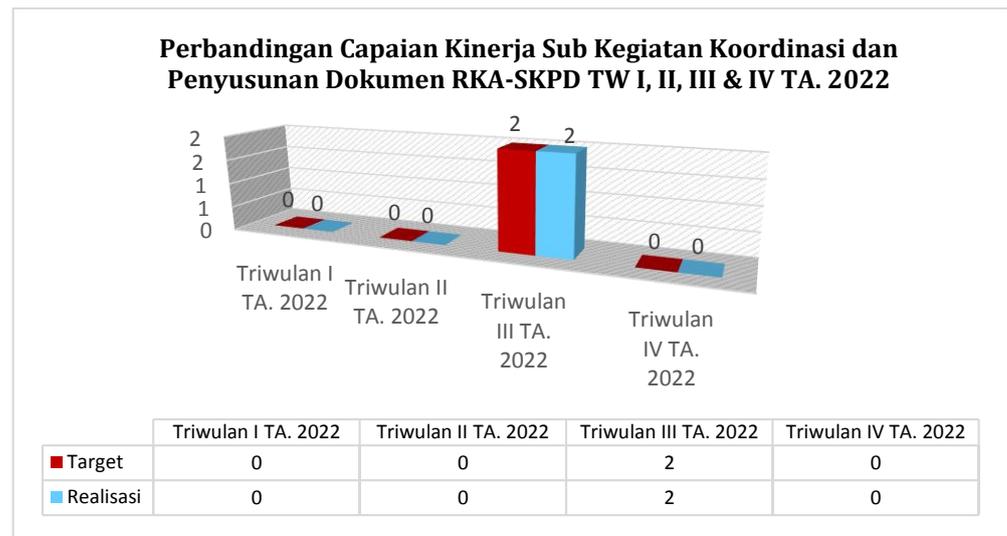
- **Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**



Grafik. 25
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target s.d triwulan IV sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen Renja Tahun 2023 dan Renja Perubahan tahun 2022 dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 28.126.145,- terdiri dari belanja ATK sebesar Rp. 2.731.145, belanja cetak Rp 3.500.000,- dan belanja makan dan minum rapat Rp 5.075.000 dan perjalanan dinas Rp 16.820.000 . Dengan realisasi keuangan Rp. 25.320.500 (90,02%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu anggaran belanja makanan dan minuman rapat disebabkan adanya beberapa agenda rapat yang pelaksanaannya digabung, karena terkadang sangat sulit untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan karena aktifitas yang padat dengan jumlah personal yang terbatas.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

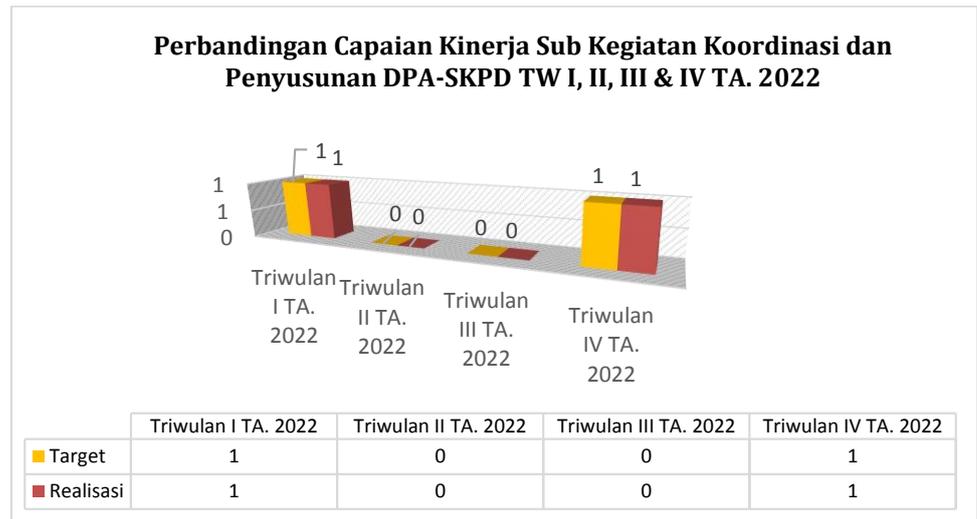


Grafik. 26
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen (100%) yaitu penyusunan RKA Perubahan 2022 serta RKA Pokok 2023. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.785.466, terdiri dari belanja ATK sebesar Rp. 2.485.466, belanja cetak Rp1.250.000 dan belanja makan minum rapat Rp 1.050.000. Dan realisasi sebesar Rp 4.253.000 (88,87%). Terdapat sisa anggaran belanja makanan dan

minuman rapat, disebabkan adanya beberapa agenda rapat yang pelaksanaannya digabung, karena terkadang sangat sulit untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan karena aktifitas yang padat dengan jumlah personal yang terbatas.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

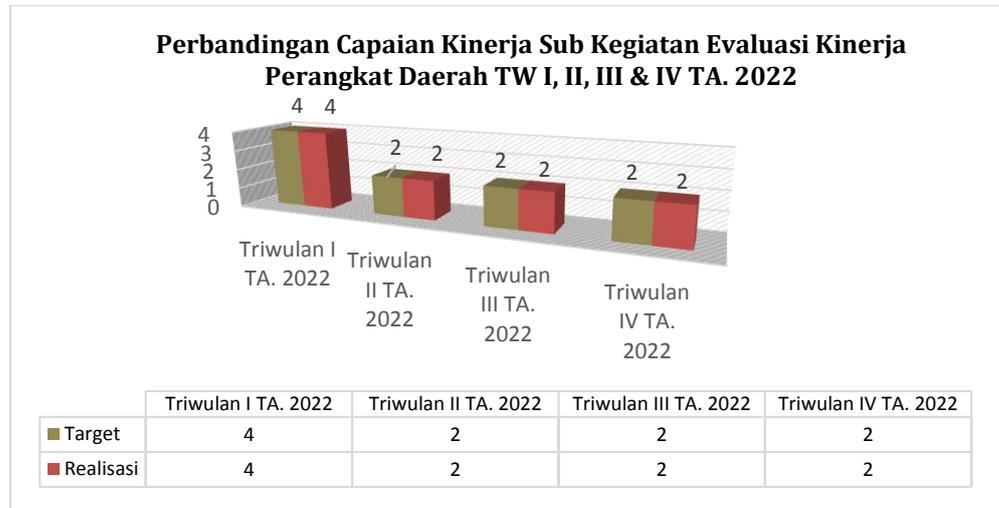


Grafik. 27

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%, terdiri dari dokumen DPA-SKPD Tahun 2022 dan DPA Perubahan Tahun 2022. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.365.240, terdiri dari belanja ATK Rp 1.965.240 dan belanja cetak Rp 2.400.000. Realisasi keuangan Rp. 4.099.400 (93,91%). Terdapat sisa anggaran yaitu belanja cetak, dimana penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan.

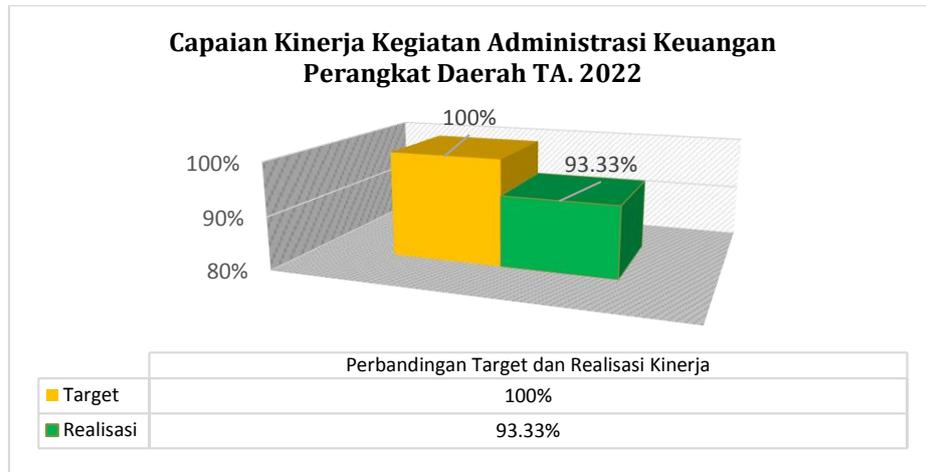
- **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**



Grafik. 28
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I s.d Triwulan IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, target sebanyak 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Dokumen yang disusun yaitu LPPD, LKPJ, Lapkin Tahun 2021, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2021, Dokumen Evaluasi Renja TW I, II & III TA. 2022 dan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2022. Disediakan anggaran sebesar Rp 48.262.280, terdiri dari belanja ATK Rp 5.097.280, belanja cetak Rp 2.750.000 dan belanja makan dan minum rapat Rp 6.825.000 dan perjalanan dinas Rp 33.590.000. Realisasi keuangan Rp. 45.794.280 (94,89%). Terdapat sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat, dimana penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan rapat. Terdapat sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat, disebabkan adanya beberapa agenda rapat yang pelaksanaannya digabung, karena terkadang sangat sulit untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan karena aktifitas yang padat dengan jumlah personal yang terbatas.

➤ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**



Grafik. 29
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 89,47% dengan persentase capaian kinerja 89,74%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 78,95%, yang diakibatkan adanya beberapa jabatan struktural eselon III dan IV yang belum terisi personil serta mutasi staf. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**



Grafik. 30
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 15 org dan realisasi 13 org dengan persentase capaian kinerja 86,67 %. Dilakukan perubahan target kinerja pada saat perubahan anggaran yaitu dari 20 org menjadi 15 org. Target yang tidak tercapai karena adanya jabatan fungsional penyetaraan dan jabatan pelaksana yang belum terisi.. Disediakan anggaran sebesar Rp 1.794.519.521, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan Rp 963.549.521, Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp 797.090.000, dan Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Rp 33.880.000. Realisasi keuangan sebesar Rp 1.712.858.640,- atau (94,45%). Sisa anggaran yang tidak terealisasi karena disediakan anggaran untuk 2 org namun sampai dengan desember 2022, tidak terdapat penambahan ASN pada BPBD Kab. Luwu Timur.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

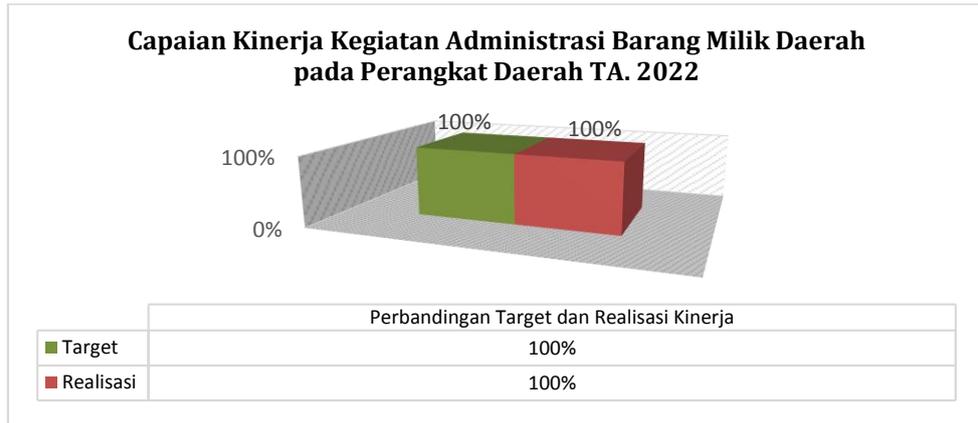


Grafik. 31
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Dokumen yang disusun yaitu Laporan Keuangan Tahun 2021 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulan I, II, III & IV sebanyak 4 dok, Laporan Bulanan Bendahara 12 dok dan laporan semester I & II sebanyak 2 dokumen. Disediakan anggaran

sebesar Rp 47.766.822, terdiri dari belanja honor pengelola keuangan Rp 19.800.000, belanja ATK Rp 5.746.822, belanja cetak Rp 1.920.000, belanja makan dan minum rapat Rp 350.000 serta belanja jasa tenaga pelayanan umum Rp 7.950.000. Realisasi keuangan sebesar Rp 47.445.800,- atau (99.33%).

➤ **Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**



Grafik. 32
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

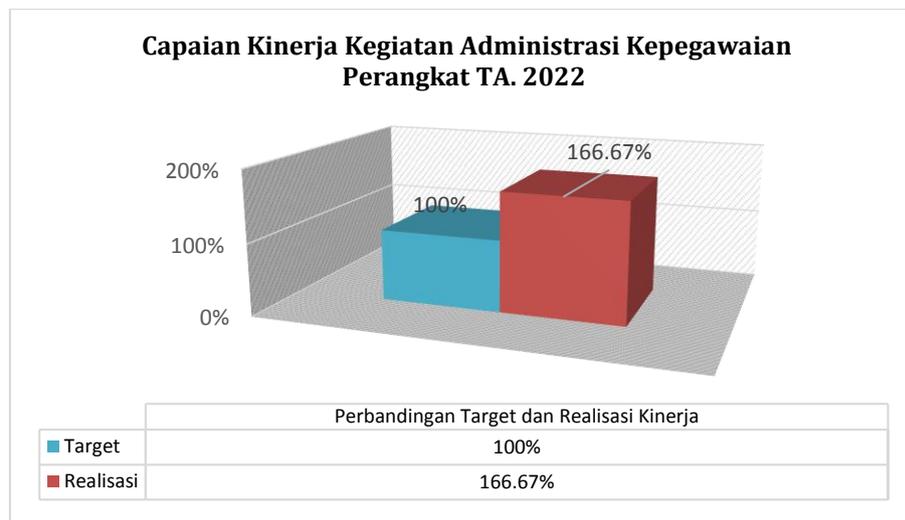
- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**



Grafik. 33
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD sebanyak 4 dokumen (TW I s.d TW IV). Disediakan anggaran sebesar Rp 18.009.260, terdiri dari belanja honor pengurus barang Rp 12.600.000, belanja ATK Rp 1.869.260, belanja cetak Rp 870.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 2.670.000. Realisasi keuangan Rp 15.270.000 (84.79%). Disediakan anggaran perjalanan dinas dalam rangka penyusunan laporan BMD, namun tidak realisasi karena penyusunan laporan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur.

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**



Grafik. 34
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 166,67% dengan persentase capaian kinerja 166,67%. Capaian kinerja melebihi target karena pada triwulan III dan IV, terdapat beberapa bimtek atau diklat yang dilaksanakan oleh OPD lain yang diikuti oleh personil BPBD dan pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

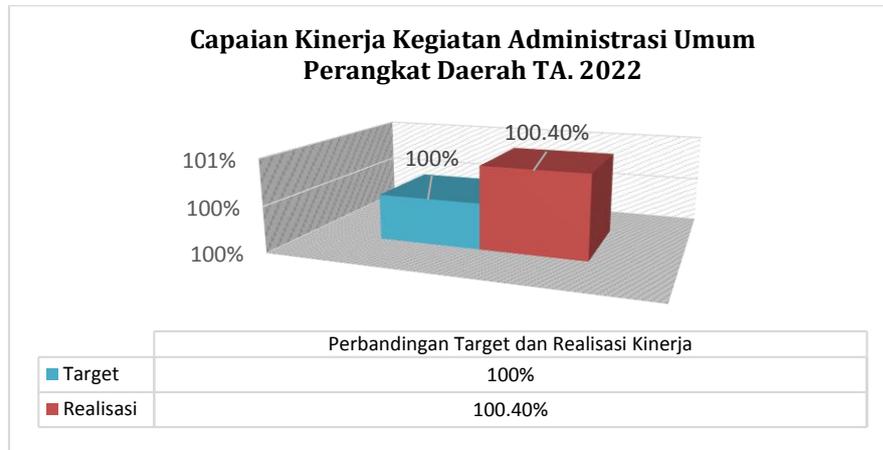
- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**



Grafik. 35
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target Tahun 2022 sebanyak 15 org dan realisasi 25 orang dengan persentase capaian kinerja 166,67%. Adapun bimtek/diklat yang diikuti yaitu Bimtek SKP 1 org, Bimtek SAKIP 2 org, Bimtek Water Rescue 2 org, Coaching Klinik PMPRB 3 org dan Pendidikan dan Latihan Dasar Keselamatan Pelayaran 9 org), Diklat Teknis Jitupasna 1 org, Bimtek LKPJ & LPPD 1 org, Bimtek Pengelolaan Keuangan TAPD, Kepala OPD & Banggar 1 org, Bimtek SKPD 5 org. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 55.780.000, terdiri dari belanja kontribusi Rp 30.000.000, dan belanja perjalanan dinas Rp 25.780.000. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 43.583.850,- atau 78,14%. Sisa anggaran yang cukup besar adalah belanja biaya kontribusi Bimtek. Pada dasarnya penggunaan anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan undangan pemanggilan peserta.

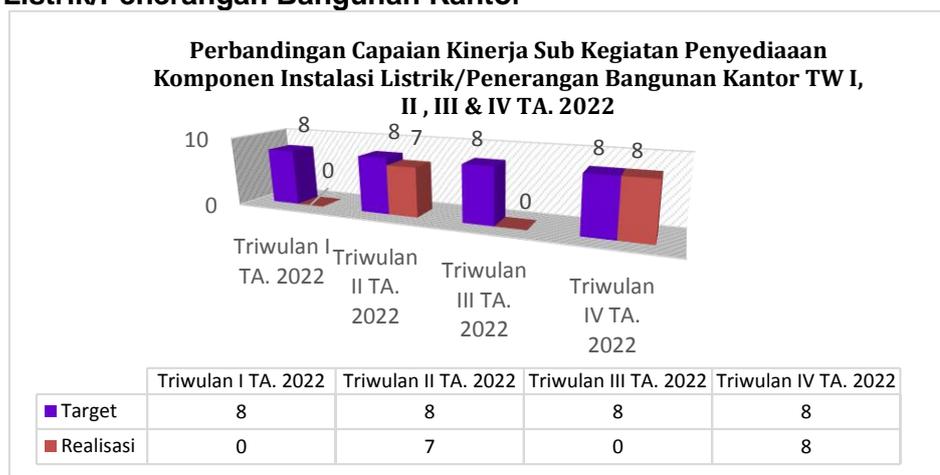
➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**



Grafik. 36
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100,4% dengan persentase capaian kinerja 100,4%. Capaian kinerja melebihi dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian >100%, dan capaian tersebut mempengaruhi capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

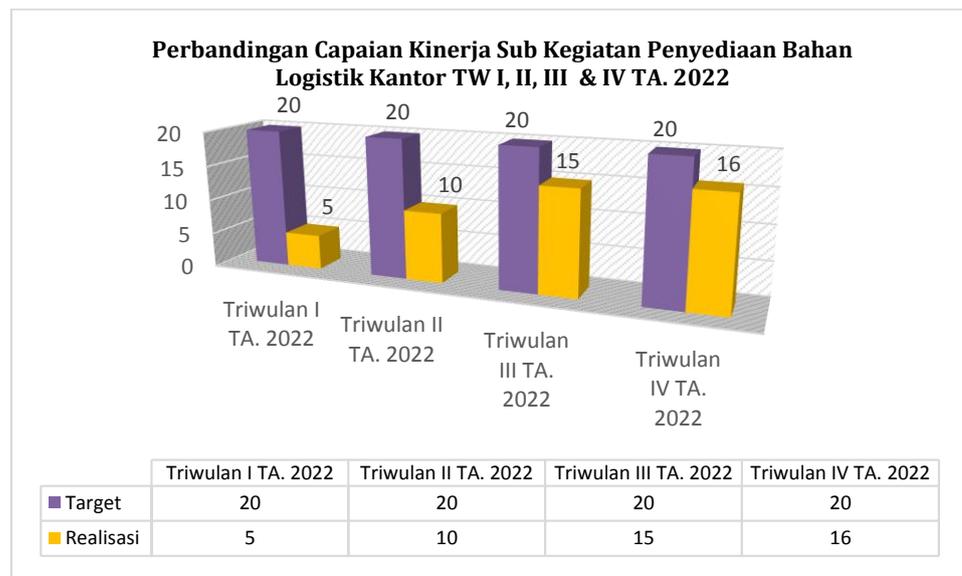
- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**



Grafik. 37
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, target 8 jenis, dan terealisasi 8 jenis (100%). Adapun komponen alat listrik yang disediakan yaitu Kabel Listrik, Lampu LED, Conector/Adaptor, Isolasi, Pitting, Kabel SR, Terminal, Steker, Lampu Sorot. Kebutuhan alat listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Disediakan anggaran sebesar Rp 24.625.000,- dengan realisasi keuangan Rp 21.404.000,- atau 86,92%. Realisasi keuangan tidak sesuai target karena direncanakan pemasangan lampu sorot di halaman kantor, namun tidak terlaksana terkendala ketersediaan barang yang terbatas, sehingga yang semula direncanakan 8 unit terealisasi hanya 4 unit. Dan pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**



Grafik. 38
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 20 jenis dan realisasi 20 jenis (100%) terdiri dari BBM operasional 1 jenis, Oli Pelumas 2 jenis dan 17 jenis alat dan bahan kebersihan yaitu Tisu, Harpic (pembersih kamar mandi), Super pel (pembersih lantai), Stella (pengharum ruangan), Sabun Cair, Alat pel, sapu, sikat kamar mandi, sapu lidi bergagang, Tempat sampah besar, keranjang sampah, sikat kloset, alat pel, tempah sampah besar dan sedang, pembersih kamar mandi. Disediakan anggaran sebesar

Rp 29.349.250, terdiri dari belanja BBM/Pelumas Rp 22.324.000 dan belanja alat dan bahan pembersih Rp 7.025.250, dan terealisasi Rp 29.304.250,- atau 99,85%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

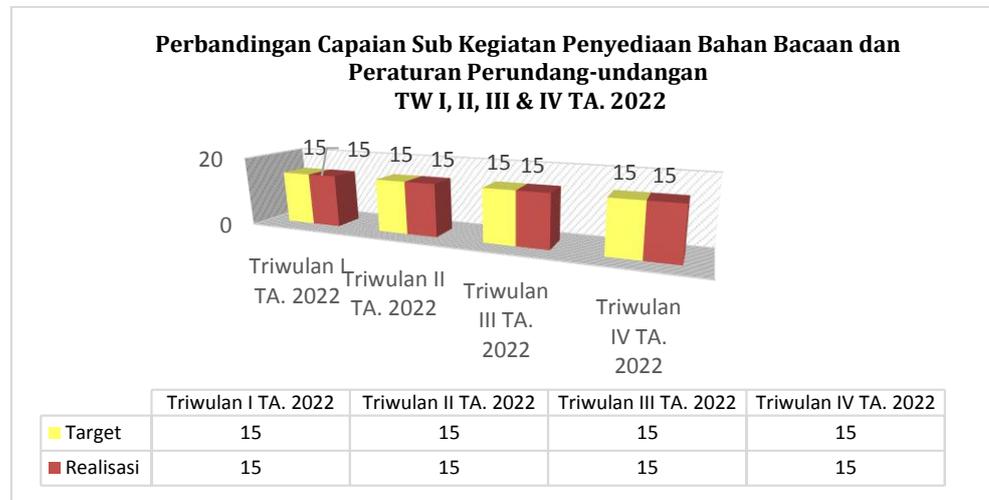
- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**



Grafik. 39
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan, target 3 jenis setiap triwulan dan realisasi 3 jenis (100%) terdiri dari penggandaan, cetak dan jilid. Disediakan anggaran sebesar Rp 20.625.000, dan realisasi keuangan Rp 14.221.000,- atau 68,95%. Realisasi keuangan tidak sesuai target karena disediakan anggaran belanja cetak baliho untuk papan himbuan peringatan dini, namun tidak direalisasikan karena kondisi baliho masih layak. Pada dasarnya penggunaan anggaran juga disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

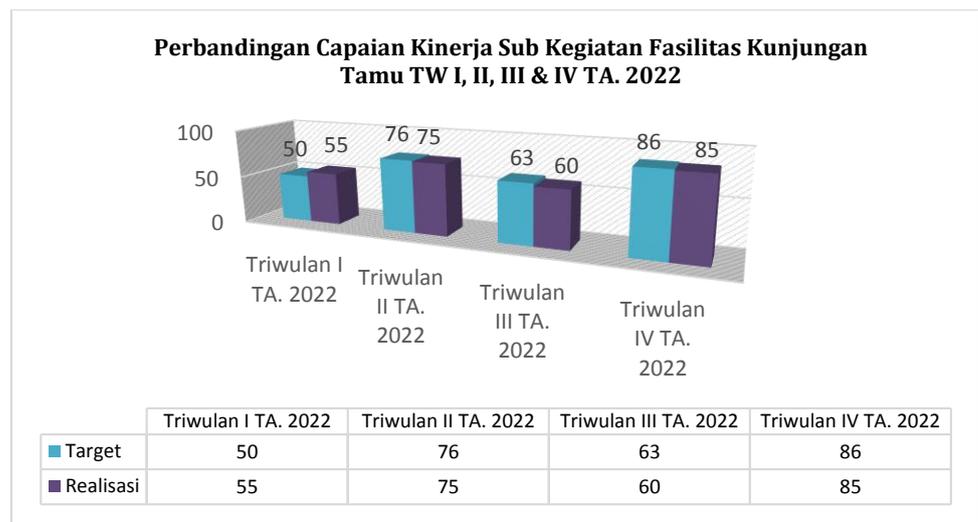
- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**



Grafik. 40
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, target tahun 2022 sebanyak 60 ekpl dan terealisasi 60 ekpl dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Koran lokal 12 ekpl, Koran Nasional 12 ekpl dan Koran Regional 36 ekpl. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.720.000,- dan terealisasi Rp 6.720.000,- atau 100%.

- **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu**

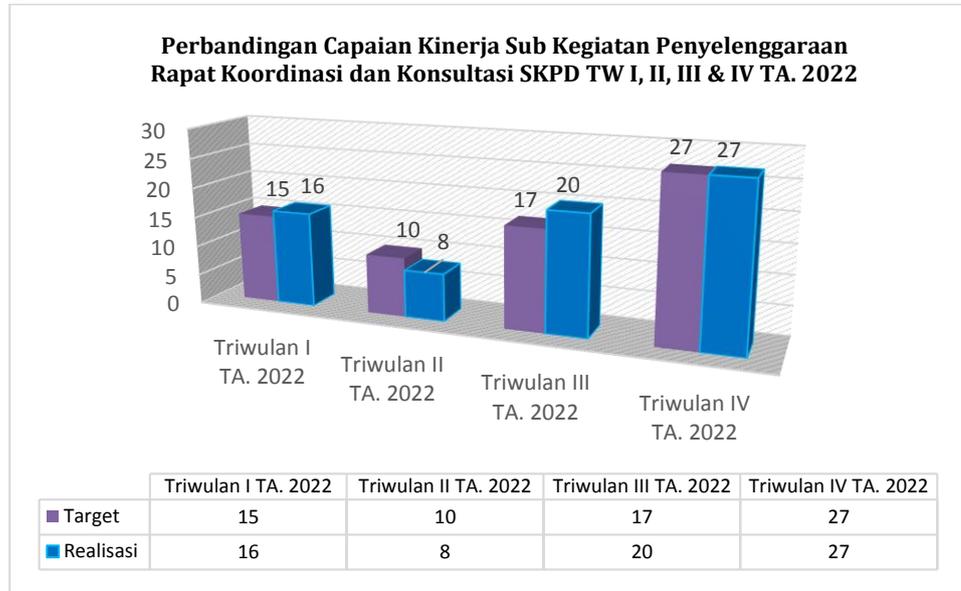


Grafik. 41
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target pada tahun 2022 sebanyak 275 org dan terealisasi 275

org dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 19.800.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 19.610.000,- atau 99,04%.

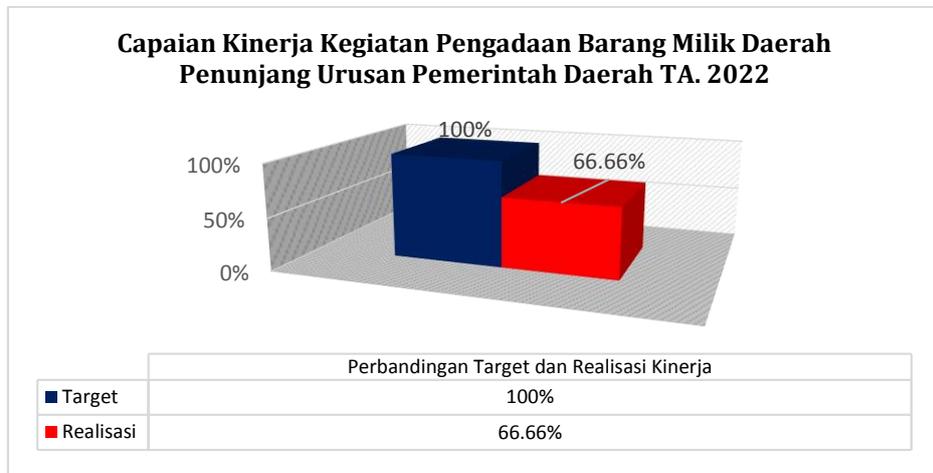
- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**



Grafik. 42
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target tahun 2022 sebanyak 69 kali dan terealisasi 71 kali dengan capaian kinerja 102,9%. Capaian yang melebihi dari target disebabkan terdapat beberapa kegiatan urgen yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. Disamping itu beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD sehingga anggaran dapat digunakan lebih dari target yang direncanakan. Disediakan anggaran sebesar Rp 411.349.600, terdiri dari belanja jasa upah sopir Rp 18.000.000, belanja perjalanan dinas Rp 393.349.600. dengan realisasi keuangan Rp 410.498.955,- atau 99,79%.

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**



Grafik. 43
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target sebesar 100% dan realisasi 66,66%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena dari 3 sub kegiatan yang direncanakan, 1 diantaranya yang tidak terealisasi yaitu Pembangunan Tempat Parkir. Hal ini mempengaruhi capaian kegiatan secara keseluruhan.. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

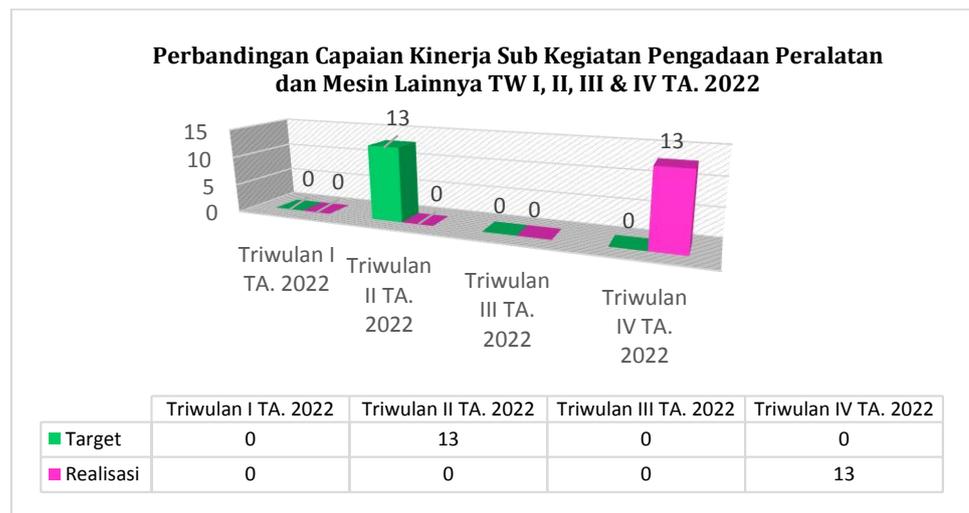
- **Pengadaan Mebel**



Grafik. 44
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah mebel yang diadakan, dengan target pengadaan kursi kerja eselon IV sebanyak 4 unit dan terealisasi 4 unit (100%) yaitu Pengadaan Kursi kerja eselon IV. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan mebel direncanakan pada triwulan II TA. 2022, namun baru terealisasi pada Triwulan IV karena terkendala pada harga di e-catalog yang lebih tinggi dibanding harga melalui pembelian langsung pada toko, dan berdasarkan hasil konsultasi dengan pejabat pengadaan, maka pembelian barang dilakukan melalui mbizmarket. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 8.000.000, dan realisasi keuangan Rp 7.770.000,- atau 97,13%. Terdapat sisa anggaran Rp 230.000,- yang merupakan sisa kontrak/SPK.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

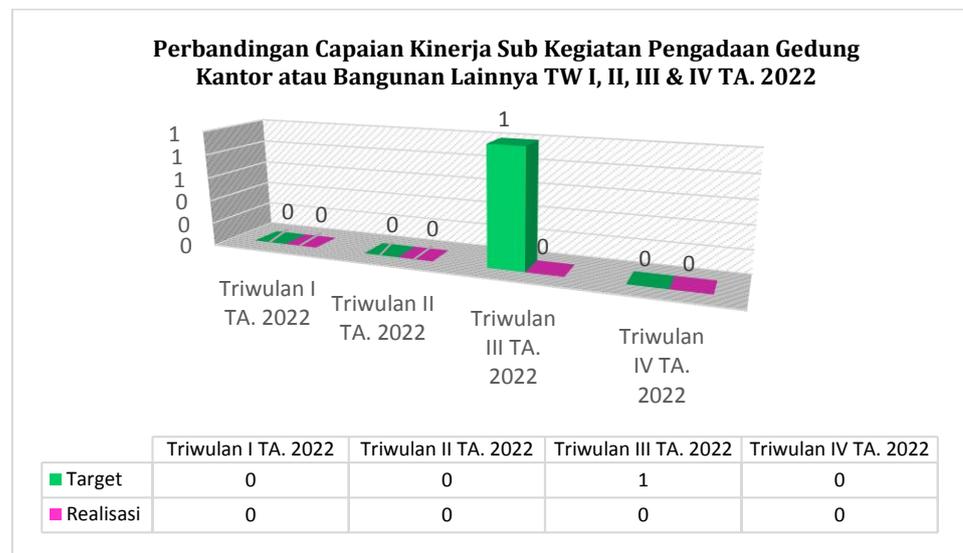


Grafik. 45
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan, target 13 unit dan terealisasi 13 unit (100%) yaitu Pengadaan Locker 2 pintu sebanyak 10 unit, Rak Arsip 2 unit dan Filling Kabinet 2 unit. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan mebel direncanakan pada triwulan II TA. 2022, namun baru terealisasi pada Triwulan IV karena terkendala pada harga di e-catalog yang lebih tinggi dibanding harga melalui pembelian langsung pada toko, dan berdasarkan hasil konsultasi dengan pejabat pengadaan, maka pembelian barang dilakukan melalui mbizmarket. Disediakan anggaran sebesar Rp 29.268.000, terdiri dari belanja Penyimpan Perlengkapan

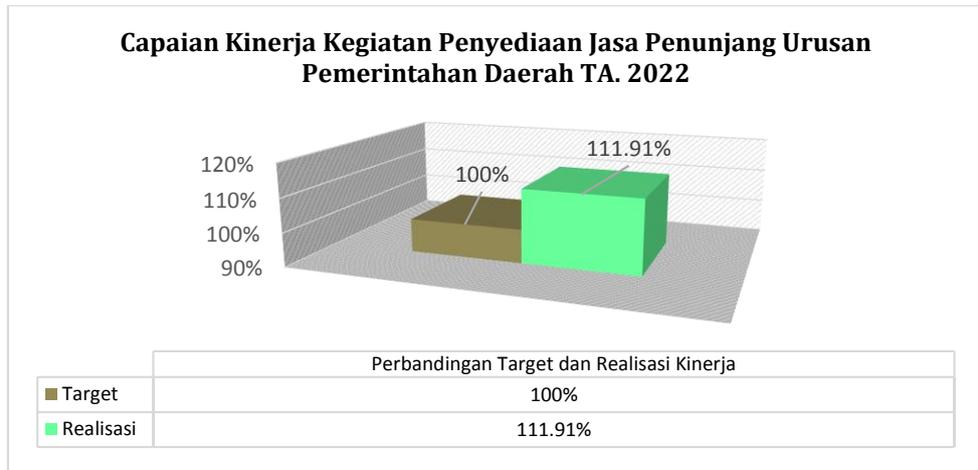
Kantor Rp 10.500.000 dan belanja alat kantor lainnya Rp 18.768.000, dan terealisasi Rp 27.634.300 atau 94,42%. Terdapat sisa anggaran Rp 1.634.000,- yang merupakan sisa kontrak/SPK.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, target 1 unit dan realisasi 0 unit (0%). Berdasarkan anggaran kas, pengadaan bangunan parkir direncanakan pada triwulan III TA. 2022, namun tidak terlaksana karena terkendala jasa konsultan yang terbatas serta kurangnya minat karena pagu anggaran yang sangat minim. Disamping itu besaran jasa konsultan masih dibawah besaran remunerasi. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 74.900.000 dan realisasi keuangan 0%.



Grafik. 46
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

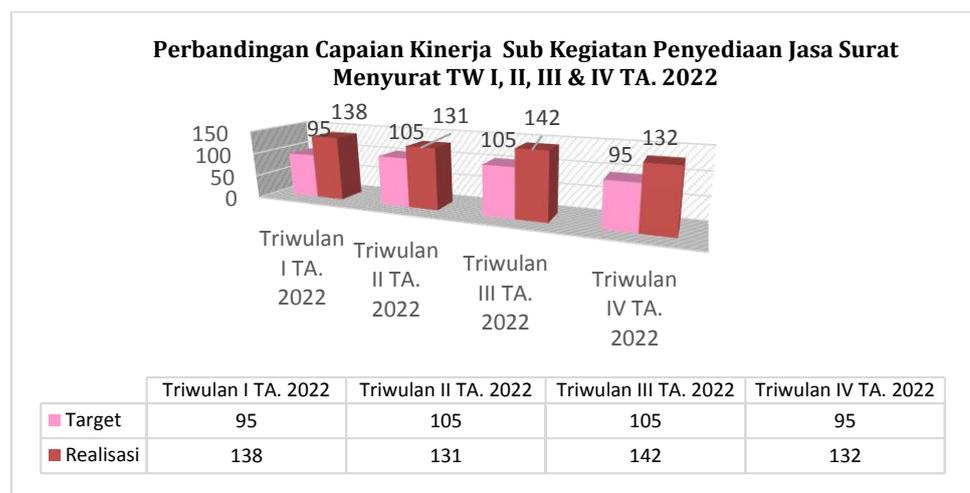
➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



Grafik. 47
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 111,91% dengan persentase capaian kinerja 111,91%. Capaian kinerja melebihi dari target karena terdapat 1 sub kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, capaian kerjanya >100% sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**



Grafik. 48
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 202

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target tahun 2022 sebanyak 400 surat dan terealisasi 543 surat dengan persentase capaian kinerja 135,75%. Terdiri dari 354 surat masuk dan 189 surat keluar. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.195.475,- terdiri dari belanja ATK Rp 2.745.475, belanja materai Rp 1.350.000 dan belanja paket pengiriman Rp 100.000. Dan terealisasi Rp 3.969.000,- atau 94,60%. Terdapat sisa belanja ATK dan paket pengiriman sebesar Rp 226.475,- Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

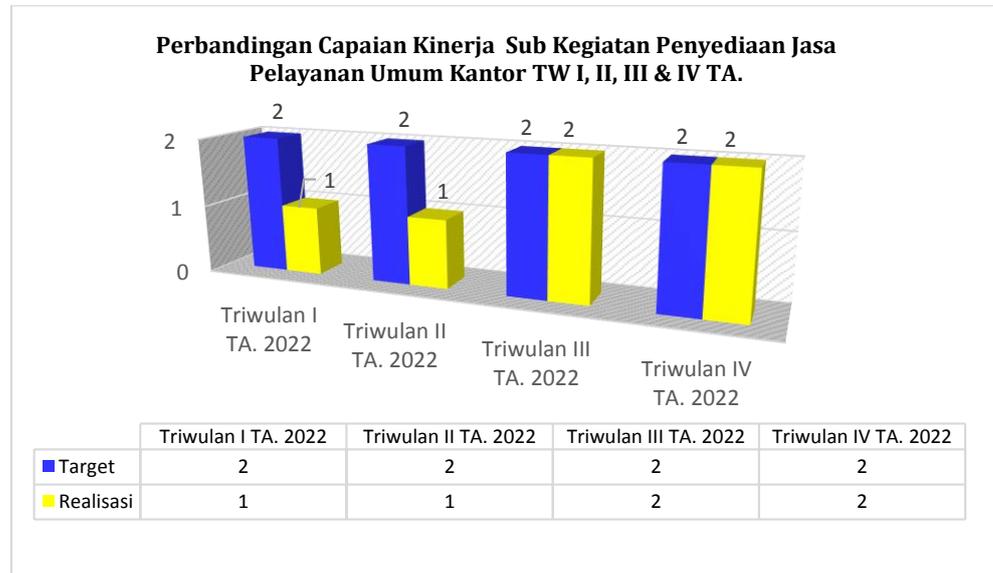
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**



Grafik. 49
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target tahun 2022 sebanyak 36 rekening dan realisasi 36 rekening dengan persentase capaian kinerja 100%. terdiri dari Listrik BPBD 12 rek, Token listrik gudang logistik 2 rek, Air kantor 12 rek, kartu halo 10 rek dengan persentase capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 43.952.640,- terdiri dari belanja tagihan telepon Rp 1.200.000, belanja tagihan air Rp 1.512.000 dan belanja tagihan listrik Rp 41.240.640. Dan terealisasi Rp 40.703.844,- atau 92,61%. Terdapat sisa anggaran belanja listrik yang cukup besar karena pemakaian token listrik pada Pusalops mengalami penurunan. Penggunaan anggaran bersifat Riil Cost.

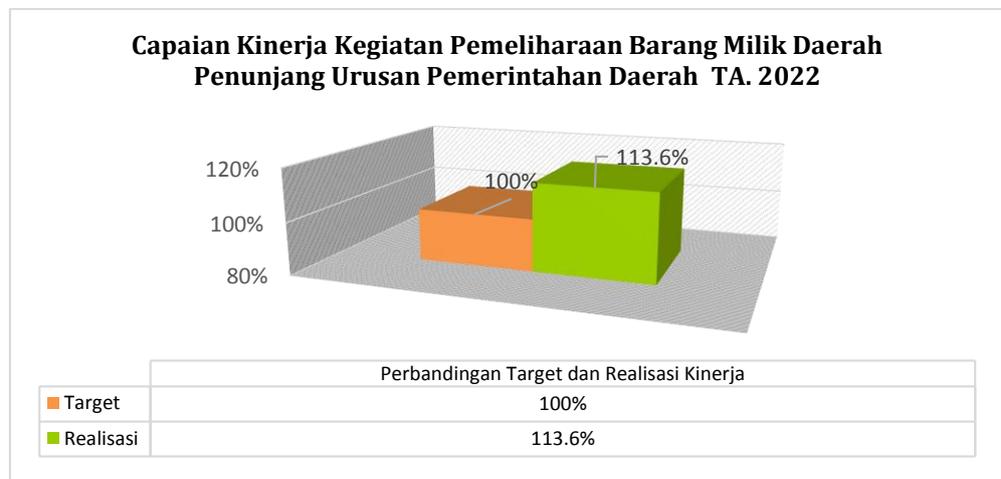
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**



Grafik. 50
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 2 orang dan realisasi 2 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan pejabat pengadaan. Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 19.800.000,- terdiri dari belanja honor upah jasa cleaning service Rp 15.000.000,- dan belanja honor pejabat pengadaan Rp 4.800.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp 18.200.000,- atau 91,92%. Realisasi keuangan tidak sesuai target karena terdapat sisa anggaran honor pejabat pengadaan sebesar Rp 1.600.000 yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena SK Pejabat Pengadaan berlaku Mei 2022 sehingga honor yang terbayarkan hanya 8 bulan.

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

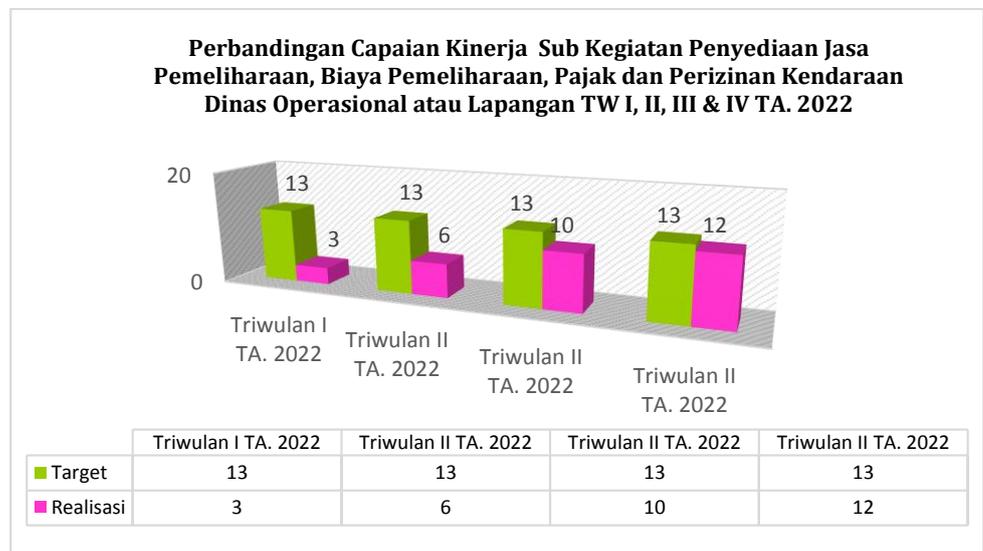


Grafik. 51

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2022

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 113,6% dengan persentase capaian kinerja 113,6%. Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah melebihi target karena dari 3 sub kegiatan pengampuh, terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya capain kinerjanya 148,57%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran bisa untuk membiayai lebih dari target yang direncanakan, faktor yang mempengaruhinya adalah SBM untuk 1 unit peralatan bisa untuk membiayai beberapa peralatan lainnya. Dan pada dasarnya BMD yang dipelihara adalah yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

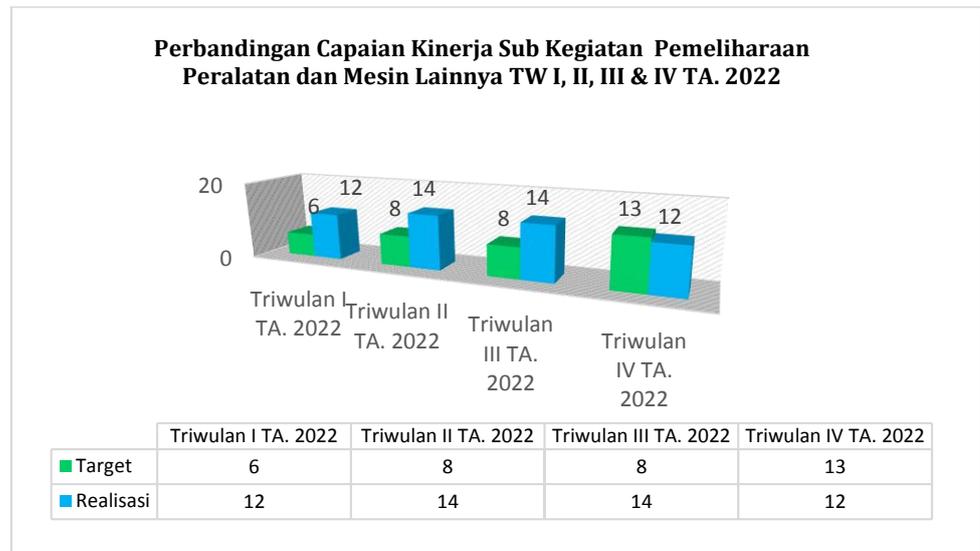
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**



Grafik. 52
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara, target 13 unit dan realisasi 12 unit dengan persentase capaian kinerja 92,31%. Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu Motor 8 unit, Mobil Truk Serbaguna 1 unit, Double Cabin 2 unit, dan mobil Operasional TRC 1 unit. Disediakan anggaran sebesar Rp 94.050.000,- terdiri dari belanja jasa pemeliharaan kendaraan perorangan Rp 15.150.000,- belanja jasa pemeliharaan kendaraan penumpang Rp 78.900.000,-. Dan terealisasi Rp 93.966.068,- atau 99,91%. Realisasi keuangan lebih besar dari realisasi kinerja karena kondisi beberapa kendaraan dinas roda empat sering mengalami kerusakan, disamping karena umur ekonomisnya yang lebih dari 10 tahun juga mobilitas yang tinggi. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan/perbaikan.

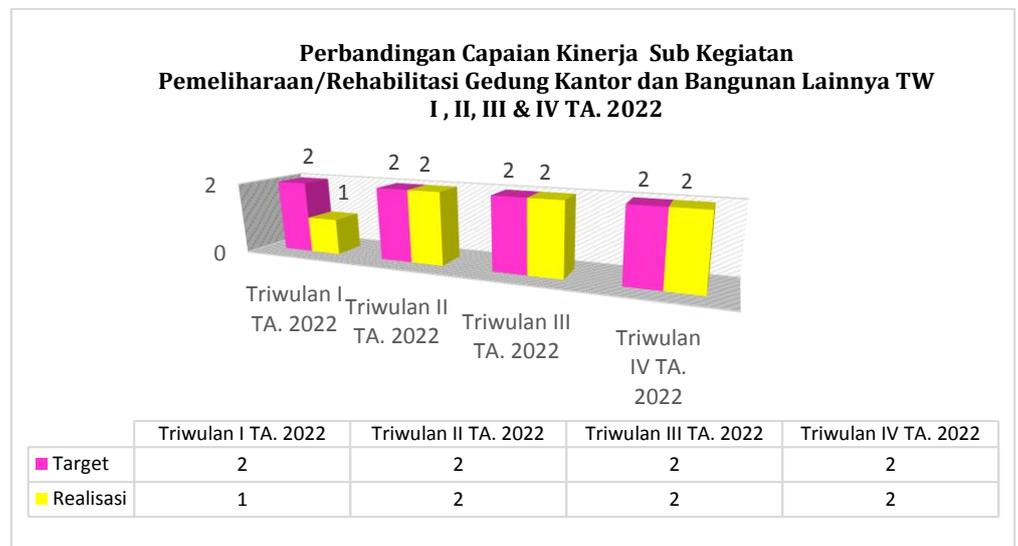
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**



Grafik. 53
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, target tahun 2022 sebanyak 35 unit dan terealisasi 52 unit dengan persentase capaian kinerja 148,57%. Adapun peralatan yang mengalami perbaikan yaitu AC 5 unit, printer 10 unit, PC 7 unit, Laptop 10 unit, chainsaw 4 unit (11 kali perbaikan), Genset 4 unit, Mesin babat 1 unit. Capaian yang melebihi target karena besaran anggaran yang disediakan untuk setiap unit peralatan sesuai dengan SBM, cukup untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan. Disediakan anggaran sebesar Rp 23.690.000,- terdiri dari belanja pemeliharaan alat berat-alat bantu-Electrik Generating Set Rp 4.000.000,- belanja alat angkutan apung tak bermotor Rp 1.400.000,- belanja pemeliharaan alat-alat kantor lainnya Rp 5.800.000,- dan belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp 12.490.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp 23.505.000,- atau 99,22%. Pada dasarnya penggunaan anggaran pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi peralatan yang memerlukan perbaikan.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**



Grafik. 54
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2022

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, target 2 unit dan realisasi 2 unit (100%). Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah Perbaikan pintu toilet kantor BPBD dan Rabat Pelataran Kantor BPBD, Perbaikan Pintu, Perbaikan Ruang Kerja dan Perbaikan Kamar Mandi Pusdalops. Disediakan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasi Rp 16.020.000,- atau 80,10%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena direncanakan pemasangan papan nama kantor (menggunakan Neon Box) namun tidak dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tahun 2023 akan dilakukan Pembangunan Papan Nama Kantor. Penggunaan anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2023 antara lain :

1. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2021, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 178 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 10 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 0 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 10 Kejadian), Cuaca Ekstrem 6 Kejadian, Banjir 2 Kejadian, Tanah Longsor 2 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 5 Kejadian dan Gempa Bumi 153 kejadian. Dan kejadian bencana yang mendominasi di tahun 2021 yaitu Gempa Bumi. Kejadian tersebut kebanyakan terjadi di Luar Kabupaten Luwu Timur namun terasa getarannya. Intensitas kejadian gempa bumi meningkat setelah terjadinya kejadian gempa bumi akibat pergerakan sesar palu koro. Dan perlu menjadi perhatian yaitu adanya Sesar Matano serta keberadaan 3 Dam Seri Larona. Olehnya itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut
2. Terdapat 3 (tiga) bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dibangun seri pada DAS Larona, aktifitas operasional dam mempengaruhi debit air sungai Larona yang selalu naik dan menggenangi areal persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kegagalan pada salah satu dam menjadi ancaman yang dapat menyebabkan bencana besar. Kondisi ini memerlukan upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana yang melibatkan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang akan terkena dampak.
3. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat dan kondisi yang sangat kompleks, yaitu sulit diprediksinya musim hujan dan kemarau yang berpengaruh terhadap musim tanam bagi sebagian petani di sebagian wilayah di Indonesia. Selanjutnya, banjir yang diakibatkan oleh cuaca yang ekstrem, seperti hujan lebat dengan intensitas yang tinggi pada periode yang pendek, sedangkan kondisi dan kapasitas lingkungan tidak siap menerimanya. Potensi bencana yang tinggi tidak hanya menjadi refleksi fenomena alam secara geografis yang sangat khas untuk suatu wilayah, tetapi merupakan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan (vulnerability) masyarakat yang membutuhkan mekanisme adaptasi.
4. Daerah rawan bencana (Penanganan Mitigasi Daerah Rawan Bencana)
5. Dampak Pandemi Covid-19, dimana kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan

secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

6. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
8. Luasnya cakupan wilayah penanganan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil serta peralatan yang tersedia;
9. Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
10. Pelaksanaan SPM serta ketentuan umum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang didalam isinya mengharuskan jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai urusan wajib daerah serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

1.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan ruang pada daerah-daerah yang rawan bencana berdasarkan kajian risiko bencana.
- b. Melakukan kajian resiko bencana pada daerah yang berpotensi bencana sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan penanggulangan bencana dan memulihkan kondisi yang rusak akibat bencana.
- c. Segera menyusun Rencana Kontijensi ancaman Gempa Bumi, Longsor, Banjir Bandang (mengesahkan, mensosialisasikan, dan menguji dalam geladi/simulas)
- d. Memetakan fasilitas umum penting di area rawan bencana; Sekolah, fasilitas kesehatan, Desa
- e. Melakukan upaya peringatan dini terhadap bencana yang mungkin dapat terjadi pada daerah-daerah rawan bencana.

- f. Meningkatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- g. Menegakkan peraturan pengelolaan lingkungan hidup dengan tegas.
- h. Membentuk Forum PRB dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah
- i. Mengalokasikan minimal 1% APBD untuk Pengurangan Risiko Bencana (Pencegahan, Mitigasi, kesiapsiagaan dan EWS) dapat melekat pada OPD strategis tidak hanya di BPBD
- j. Mengalokasikan 0.5% APBD untuk Belanja Tidak terduga khusus bencana
- k. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana.
- l. Menyediakan sarana dan prasana penanggulangan yang memadai.
- m. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- n. Menindaklanjuti Rencana Tanggap Darurat PT. Vale Indonesia Tbk. Terkait penanganan Dam Larona.
- o. Mempersiapkan data terkait kebutuhan logistik dan stok ketersediaan pangan pada OPD terkait untuk mengantisipasi jika terjadi bencana.
- p. Mempersiapkan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait maupun dunia usaha dalam mengantisipasi kejadian bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Pada proses perjalanannya, beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersediaan dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Luwu Timur

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA OPERASI				7,149,598,408	BELANJA OPERASI				6,725,959,550	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur	95%	4,173,598,408	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur	95%	2,970,335,258	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur	100%	86,250,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur	100%	86,441,920	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	21,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	37,789,300	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	12,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4,925,200	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	12,750,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4,354,340	

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Dokumen	40,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Dokumen	39,373,080	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	2,421,768,908	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	Kab. Luwu Timur	100%	1,865,269,023	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	20 orang	2,350,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	16 orang	1,817,074,823	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	18 Dokumen	61,768,908	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	18 Dokumen	48,194,200	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 Dokumen	-	
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	100%	35,000,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100%	17,949,800	
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	4 Dokumen	20,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	4 Dokumen	17,949,800	
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 Dokumen	-	

10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	1 Dokumen	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	90,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	66,230,000
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	18 Stel	20,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 stel	0
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 orang	60,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 orang	66,230,000
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	1 Dokumen	10,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	519,500,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	486,404,800
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	8 Jenis	18,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	8 Jenis	12,625,000
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 Jenis	30,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 Jenis	25,000,000

16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	40,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	25,940,000	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	60 exemplar	6,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	60 exemplar	6,720,000	
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 orang	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 orang	22,275,000	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 kali	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 kali	393,844,800	
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	10,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 Dokumen	-	
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur	100%	765,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur	100%	225,740,000	
21	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Unit	25,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	6 unit	25,000,000	
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	15 unit	40,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	8 unit	62,640,000	

23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	5 unit	50,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	3 unit	33,100,000	
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 unit	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 unit	105,000,000	
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 unit	500,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 unit	-	
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 unit	50,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 unit	-	
VIII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur	100%	91,079,500	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur	100%	79,459,715	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 surat	4,250,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 surat	8,807,475	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	36 Rekening	65,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	36 Rekening	51,252,240	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 orang	21,829,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 orang	19,400,000	

VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	165,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	142,840,000	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 unit	110,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 unit	113,300,000	
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 unit	19,540,000	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	10,000,000	
B	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	100%	2,976,000,000	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	100%	3,755,624,292	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%		
IX	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	0.10%	475,000,000	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	0.10%	194,640,642	

33	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/lega	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000,000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/lega	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	174,995,642	
34	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 org	125,000,000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 org	19,645,000	
X	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur	2.12%	1,075,000,000	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur	2.12%	499,420,450	
		Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun		100%			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun		100%		
35	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 org	150,000,000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 org	32,425,900	
36	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	21 unit	75,000,000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	21 unit	94,830,000	
37	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Desa	200,000,000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Desa	46,454,800	

38	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	50 orang	75,000,000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	50 orang	29,890,000	
39	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	174,790,750	
40	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	101,892,500	
41	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	500 org	75,000,000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	250 org	19,136,500	
XI	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur	100%	1,225,000,000	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur	100%	781,623,000	
42	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	850,000,000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	652,720,000	
43	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100,000,000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38,050,000	

44	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100,000,000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	57,543,000	
45	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75,000,000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20,000,000	
46	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100,000,000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13,310,000	
XII	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Kab. Luwu Timur	100 %	201,000,000	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Kab. Luwu Timur	100 %	2,279,940,200	
47	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	75,000,000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	64,997,400	
48	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	21,000,000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	19,972,800	
49	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000,000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2,194,970,000	

		Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen		
50	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	20,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen		-
51	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit	10,000,000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 unit		-
JUMLAH TOTAL					7,149,598,408	JUMLAH TOTAL					6,725,959,550

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Perusahaan/ Instansi Swasta, yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2023 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan rencana kerja. Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja Perubahan adalah penyesuaian program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Dan pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan.

Tabel (T-C.32)
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Luwu Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan 2 program, 12 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Rp. **6,725,959,550,-**. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
									6,725,959,550	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,970,335,258	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								86,441,920	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Dokumen	100%	37,789,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Dokumen	100%	4,925,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Dokumen	100%	4,354,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	10 Dokumen	100%	39,373,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,865,269,023	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	16 Orang	100%	1,817,074,823	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase administrasi rakneuangan yang terselenggara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	18 Dokumen	100%	48,194,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								17,949,800	

7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	4 Dokumen	100%	17,949,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									66,230,000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	0 Stel	100%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	18 Orang	100%	66,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
V Administrasi Umum Perangkat Daerah									486,404,800	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	8 Jenis	100%	12,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	95%	20 Jenis	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	3 Jenis	100%	25,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	60 Exampilar	100%	6,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	275 Orang	100%	22,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	60 Kali	100%	393,844,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									225,740,000	
16	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	6 Unit	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mailli, Puncuk Indah	95%	8 Unit	100%	62,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mailli, Puncuk Indah	95%	1 Unit	100%	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Mailli, Puncuk Indah	95%	3 Unit	100%	33,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								79,459,715	
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Mailli, Semua Kelurahan	95%	400 Surat	100%	8,807,475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Mailli, Puncuk Indah	95%	36 Rekening	100%	51,252,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Mailli, Puncuk Indah	95%	2 Orang	100%	19,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								142,840,000	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	13 Unit	100%	113,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	34 Unit	100%	19,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Mailli, Puncuk Indah	95%	2 Unit	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								3,755,624,292	
IX	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								194,640,642	
26	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	0.12%	174,995,642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
27	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	250 Orang	0.12%	19,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

X	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								499,420,450	
28	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	2.79%	174,790,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
29	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	50 Orang	2.79%	32,425,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
30	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	21 Unit	2.79%	94,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
31	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Desa	2.79%	46,454,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
32	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	43 Orang	2.79%	29,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
33	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	2.79%	101,892,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
34	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	umlah warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	250 Orang	2.79%	19,136,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
XI	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								781,623,000	
35	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	652,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

36	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	38,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
37	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	57,543,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
38	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
39	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	13,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
XII	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								2,279,940,200	
40	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	100 % 2.79 %	19,972,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
41	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100%	1 Lembaga	100 % 2.79 %	64,997,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
42	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen 1 Dokumen	100 % 2.79 %	2,194,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									6,725,959,550	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2023, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan OPD yang membidangi fungsi lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Malili, 21 Juli 2023

**BH. KEPALA RELAKSANA,**
MASDIN, AP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730315 199311 1 001